

L A P O R A N

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2007



Diterbitkan : Desember 2007
Data Tahun 2006 – 2007



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Subidang Pengairan, SDA dan Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Sukamara**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7,5 Sukamara

Telp/Fax : (0532) 26101

E-mail : baplh_sukma@yahoo.com

KATA PENGANTAR



Meningkatnya pertumbuhan penduduk, industrialisasi dan diversifikasi ekonomi menyebabkan isu pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam menjadi aspek penting dalam pembangunan saat ini. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan dasar pembangunan berkelanjutan yang mensyaratkan adanya efisiensi ekonomi, keadilan social serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian menuntut para pengambil keputusan untuk menghilangkan pendekatan sektoral yang sempit serta mengintegrasikan isu lingkungan untuk pembuatan keputusan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menuntut perubahan cara pengumpulan informasi, teknik manajemen dan perencanaan yang mencakup dimensi waktu maupun ruang.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hanya mungkin dapat dicapai dengan informasi lingkungan yang obyektif, handal, dan dapat diperbandingkan dalam suatu kurun waktu tertentu. Hal ini berarti bahwa pemantauan dan proses informasi yang didasarkan pada basis data yang harmonis dan dapat diverifikasi.

Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sukamara menyusun laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) atau *State of the Environment Report* (SoER), yang merupakan laporan tahunan tentang kondisi lingkungan hidup, sumber daya alam dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Sukamara. Dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan kini dan prospeknya di masa mendatang yang akurat, berkala dan terjangkau bagi masyarakat, pemerintah, organisasi non pemerintah, serta pengambil keputusan.

Penyusunan SLHD tahun 2007 menggunakan pendekatan P-S-R (*pressure, state, response*) yang mengacu pada Buku Pedoman Umum Penyusunan laporan dan Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah 2007 yang diterbitkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. SLHD 2007 menggambarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan



hidup di Kabupaten Sukamara sampai dengan tahun 2007, antara lain : tekanan dan dampak lingkungan hidup, kondisi kualitas lingkungan hidup, dan beberapa respon atau upaya yang dilakukan baik oleh Pemerintah ataupun masyarakat dalam bentuk kebijakan maupun program untuk menangani dampak lingkungan yang terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua instansi pemerintah dan non pemerintah, serta semua pihak atas dukungan, bantuan dan kerjasamanya, sehingga Laporan SLHD Kabupaten Sukamara tahun 2007 ini dapat selesai.

Kami menyadari bahwa laporan SLHD ini masih belum sepenuhnya dapat mewakili kondisi riil status lingkungan hidup di Kabupaten Sukamara. Namun kami berharap akan dapat melengkapinya pada SLHD tahun mendatang. Akhirnya, semoga laporan SLHD ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sukamara.

Sukamara, Desember 2007
BUPATI SUKAMARA,

Drs. H. NAWAWI MAHMUDA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan Laporan	2
1.3 Visi dan Misi	2
1.4 Gambaran Umum	3
1.5 Pertumbuhan Ekonomi	6
1.6 Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	8
1.7 Kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup	8
1.8 Kebijakan Pendataan Lingkungan	9
1.9 Kebijakan Rencana Tata Ruang	9
1.10. Kebijakan Sosial Ekonomi dan Budaya	10
BAB II ISU UTAMA LINGKUNGAN HIDUP	13
2.1. Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan	14
2.2. Banjir dan Abrasi Pantai	15
2.3. Lahan Kritis	18
2.4. Air Bersih	19
BAB III AIR	
3.1. Kondisi Kuantitas dan Kualitas Air	20
3.1.1 Curah Hujan	20
3.1.2. Sungai	21
3.1.3. Air Tanah	23
3.2. Tekanan Terhadap Kuantitas dan Kualitas Air	23
3.2.1. Erosi dan Sedimentasi	23
3.2.2. Kebutuhan Air Bersih	24
3.3. Dampak Perubahan Kuantitas dan Kualitas Air	25



3.3.1.	Limbah Rumah Tangga/Domestik dan Pasar	25
3.3.2.	Kerusakan Daerah Catchment, Sempadan Sungai dan Badan Sungai	26
3.3.3.	Pencemaran Air	27
3.4.	Upaya Pengelolaan Sumber Daya Air	33
BAB IV	UDARA	35
4.1.	Kondisi Kualitas Udara	35
4.1.1.	Iklim	35
4.1.2.	Kualitas Udara Ambien	36
4.2.	Penyebab Penurunan Kualitas Udara	39
4.2.1.	Sumber Bergerak	39
4.2.2.	Sumber Tidak Bergerak	40
4.2.2.1.	Rumah Tangga	40
4.2.2.2.	Kebakaran Hutan dan Lahan	41
BAB V	LAHAN DAN HUTAN	42
5.1.	Sumber Daya Lahan	42
5.2.	Kebakaran Hutan	44
BAB VI	KEANEKARAGAMAN HAYATI	47
6.1.	Kondisi Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sukamara	48
6.2.	Penyebab Kemerosotan Keanekaragaman Hayati	49
6.3.	Upaya Pengelolaan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	50
BAB VII	PESISIR DAN LAUT	51
BAB VIII	AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Topografi Kabupaten Sukamara	6
Tabel 1.2.	PDRB Kabupaten Sukamara Tahun 2004 – 2006 (dalam jutaan Rupiah).....	7
Tabel 3.1.	Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Sukamara	21
Tabel 3.2.	Nama Sungai Alam di Wilayah Kabupaten Sukamara	21
Tabel 3.3.	Hasil Pengujian Pemantauan Kualitas Air Sungai Jelai	28
Tabel 3.4.	Keadaan Curah Hujan di Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 – 2007.....	35
Tabel 4.2.	Kualitas Udara Ambien di Wilayah Kabupaten Sukamara	37
Tabel 4.3.	Batas Indeks Standar Pencemaran Udara dalam Satuan SI...	37
Tabel 4.4.	Indeks Standar Pencemar Udara Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara	38
Tabel 4.5.	Indeks Standar Pencemar Udara Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara	38
Tabel 4.6.	Indeks Standar Pencemar Udara Desa Sedawak Kecamatan Sukamara	38
Tabel 4.7.	Banyaknya Kendaraan Bermotor tahun 2006	40
Tabel 4.8.	Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan tahun 2002 – 2006 (km).	40
Tabel 5.1.	Rencana Tata Ruang Kabupaten Sukamara	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sukamara	4
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kabupaten Sukamara	5
Gambar 3.1.	Sungai Jelai, Sumber Air Baku Kabupaten Sukamara.....	22
Gambar 3.2.	Grafik Curah Hujan tertinggi Tahun 2006	24
Gambar 3.3.	Grafik Parameter TSS Sungai Jelai Tahun 2007	29
Gambar 3.4.	Grafik Parameter BOD ₅ Sungai Jelai Tahun 2007.....	29
Gambar 3.5.	Grafik Parameter COD Sungai Jelai Tahun 2007	30
Gambar 3.6.	Grafik Parameter DO Sungai Jelai Tahun 2007	30
Gambar 3.7.	Grafik Parameter Amoniak Bebas Sungai Jelai Tahun 2007	31
Gambar 3.8.	Grafik Parameter Phospat Sungai Jelai Tahun 2007	31
Gambar 3.9.	Grafik Parameter Nitrit Sungai Jelai Tahun 2007	32
Gambar 3.10.	Grafik Parameter Total Coliform Sungai Jelai Tahun 2007 ..	33
Gambar 7.1.	Kondisi Pantai Jelai sebelum abrasi	53
Gambar 7.2.	Kondisi Abrasi Pantai	55



ABSTRAKSI

Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2007 memberikan gambaran umum tentang kondisi lingkungan dan sebuah pemahaman tentang bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi kondisi lingkungan dan implikasinya pada kesehatan. Laporan yang disajikan dengan menggunakan pendekatan SPIR (*State-Pressure-Impact-Responses*) ini juga memuat tentang respon yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada dan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan di tahun mendatang.

Pada Bab I disajikan tentang tujuan penulisan laporan, visi dan misi Kabupaten Sukamara serta gambaran umum Kabupaten Sukamara.

Bab II memuat tentang isu utama lingkungan hidup dan faktor-faktor pendorong kondisi lingkungan hidup Kabupaten Sukamara. Tiga isu utama lingkungan hidup yang terjadi di tahun 2007 adalah masalah Abrasi Pantai, Kesehatan Masyarakat, Asap, Lahan Kritis dan air bersih.

Bab III hingga Bab VII memuat pembahasan tentang air, udara, lahan dan hutan serta keanekaragaman hayati serta Pesisir dan Laut. Pada bab-bab tersebut dijelaskan tentang kondisi, penyebab, dampak dan respon terkait dengan tema-tema di atas. Berdasarkan penjelasan pada bab-bab tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan terjadinya penurunan kualitas lingkungan di tahun 2007, baik disebabkan karena faktor alam ataupun karena akibat kegiatan manusia. Upaya-upaya pengelolaan yang telah dilakukan tetap harus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Rekomendasi bagi pengelolaan lingkungan di tahun 2008 disajikan dalam Bab VIII. Secara umum, isi rekomendasi menekankan pada keberlanjutan dan upaya peningkatan program pengelolaan yang telah ada, upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta koordinasi antar lembaga dan antar wilayah administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Data bagi penulisan Laporan SLHD ini berasal dari berbagai sumber termasuk instansi-instansi terkait di wilayah Pemerintah Kabupaten Sukamara, hasil penelitian dan pemberitaan dari media massa.



Bab 1

Pendahuluan



Keterangan Foto :
Taman Kota Kabupaten Sukamara

Sumber :
Bappeda Kabupaten Sukamara

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang terjadi sejak adanya pembangunan ekonomi memunculkan kesadaran pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat itu sendiri untuk bersama-sama berupaya melindungi sumber daya alam yang masih ada serta memperbaiki lingkungan yang sudah rusak. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan landasan untuk berbagai ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian Pemerintah meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga yang menangani masalah lingkungan dalam manajemen, penyediaan sarana yang memadai, pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum, peraturan perundangundangan, serta koordinasi antar sektor dan antar daerah. Sejalan dengan pengembangan kelembagaan, tingkat peran aktif masyarakat juga ditingkatkan dengan melibatkan organisasi keagamaan, sosial, adat, pemuda, wanita, pelajar baik formal maupun non-formal, yang berada di desa maupun kota, dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Menghadapi minimnya dana yang disediakan untuk pengelolaan lingkungan hidup, kurangnya sumber daya manusia maupun penguasaan teknologi yang ramah lingkungan, Kabupaten Sukamara mau tidak mau harus menjalin kerja sama baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah serta Kabupaten lain, maupun organisasi atau lembaga yang terkait dengan lingkungan hidup.

1.2. Tujuan Penulisan Laporan

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah bertujuan :

1. Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah;
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
3. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan kepentingan penanaman modal (investor).
4. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*) di daerah; serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
5. Menyediakan media peningkatan kesadaran bagi setiap pihak, baik dari kalangan masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah, untuk senantiasa memelihara dan menjaga kualitas lingkungan hidup Kabupaten serta mendukung upaya pembangunan berkelanjutan.

1.3. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Sukamara:

" Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sukamara yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Suasana Kehidupan yang Demokratis, Damai, Adil dan Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berwibawa dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Secara umum visi ini terbagi tiga bagian yang saling keterkaitan, yaitu:

1. Bagian pertama mengenai cita-cita Kabupaten Sukamara secara umum, yaitu mewujudkan masyarakat yang **maju, sejahtera dan mandiri**. Maju mempunyai arti mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bidang ilmu dan teknologi. Sejahtera mempunyai arti tercukupinya segala kebutuhan

secara memuaskan. Mandiri dapat diartikan tidak bergantung kepada pihak lain.

2. Bagian kedua adalah mengenai penggambaran suasana pendukung yaitu **damai, adil, demokratis, profesional, berwibawa**. Kata-kata tersebut antara lain dapat diartikan sebagai berikut :
 - Damai diartikan tidak pada posisi saling menjelekan, sinis apalagi saling menjatuhkan.
 - Adil dan demokratis suatu hal yang sama tapi pada konteks yang berbeda, yaitu adil dalam memutuskan suatu hal/perkara, dan demokratis dalam mencari penyelesaian suatu hal/perkara, yang merupakan sumber dari kehidupan itu sendiri, yang harus dikelola secara bijaksana agar terjamin kesinambungannya.
 - Profesional menunjukkan sikap dalam bertindak, sedangkan berwibawa menggambarkan keteguhan dalam bersikap.
3. Bagian terakhir **dibawah negara kesatuan Republik Indonesia**, yang menggambarkan sikap kebangsaan yang mendasari seluruh tindakan yang akan dilakukan.

1.4. Gambaran Umum

Kabupaten Sukamara dengan ibukotanya Sukamara merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2002.

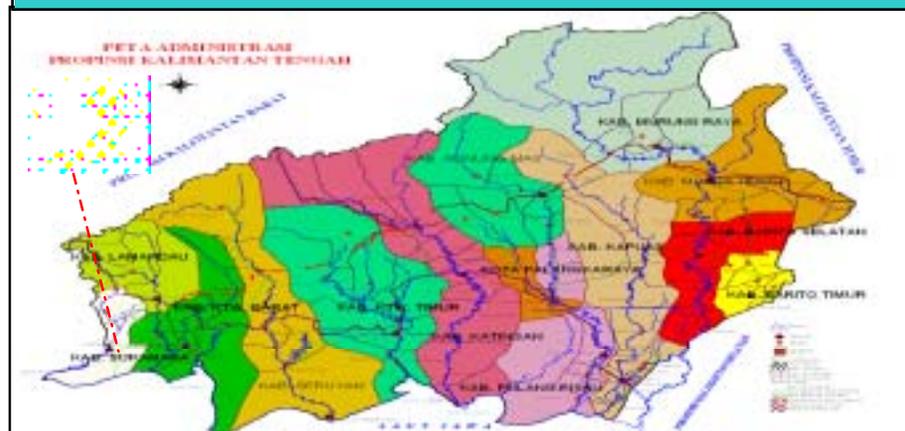
Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sukamara telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan berupa Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan serta Unit Kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Sukamara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Nomor 5 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, Nomor 6 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Nomor 7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sukamara.

Secara Administrasi Pemerintah Kabupaten Sukamara saat ini terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 3 (tiga) kelurahan dan 29 (Dua puluh sembilan) desa, dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukamara pada tahun 2006 sebesar 36.180 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 9,24 jiwa/Km² dan pola pemukimannya cenderung linier disepanjang sungai-sungai besar yang ada. Penduduk asli Sukamara umumnya mendiami tepian sungai, mempunyai sifat yang sangat terbuka dan telah berba ur dengan berbagai suku lain di Indonesia, merupakan potensi sumber daya manusia yang perlu dibina dan dikembangkan terus menerus untuk secara bersama-sama membangun Kabupaten Sukamara menuju kehidupan yang lebih baik

Kabupaten Sukamara yang lokasinya relatif dekat dan berhadapan langsung dengan Pulau Jawa dan Propinsi Kalimantan Barat serta Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk berinteraksi dalam kegiatan perekonomian dimasa yang akan datang. Kabupaten Sukamara dengan bahan baku yang melimpah mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan menjadi industri pengolahan, sedangkan Pulau Jawa yang lokasinya relatif dekat dengan Kabupaten Sukamara dengan penduduk yang sangat besar merupakan sumber penting dalam pemenuhan tenaga kerja.

Dukungan sarana dan prasarana dasar yaitu dengan dibangunnya jalan lintas Kalimantan, Poros Selatan serta jalan-jalan akses yang menghubungkan antar keduanya, membuka peluang dalam memacu laju pertumbuhan daerah.

Gambar 1.1 Peta Provinsi Kalimantan Tengah & Kabupaten Sukamara

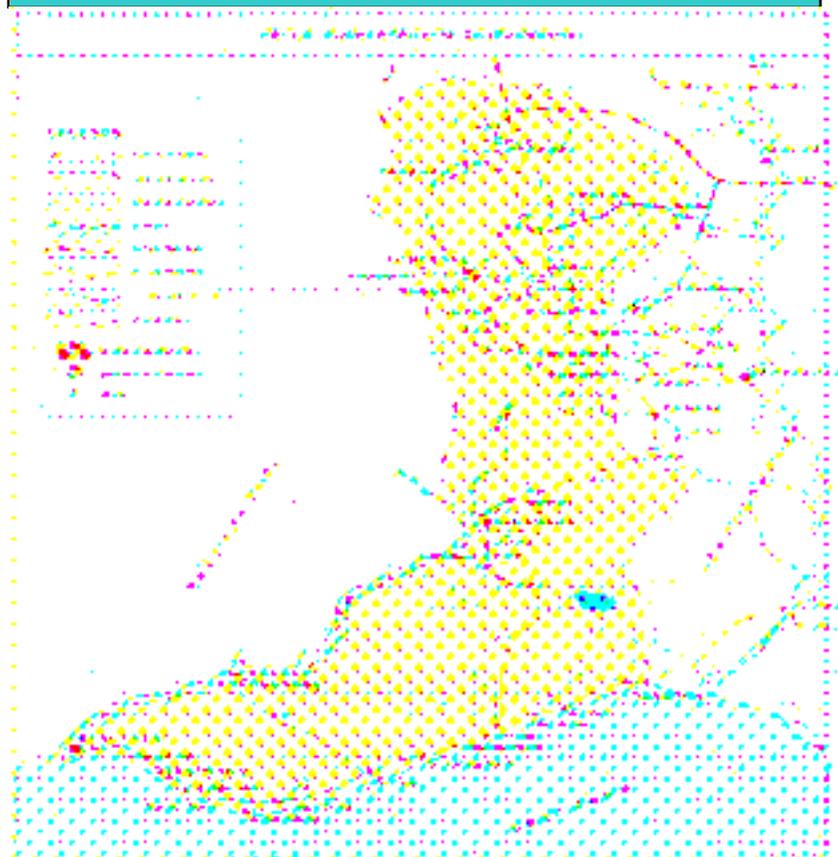


Secara geografis Kabupaten Sukamara terletak pada 2° 19' sampai dengan 3° 07' 00" Lintang Selatan dan 110° 25' sampai dengan 111° 9' 50" Bujur Timur, secara administrasi berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamandau.
- Sebelah Timur : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Propinsi Kalimantan Barat.

Luas wilayah Kabupaten Sukamara adalah 3.827 Km² atau 382.700 Ha kurang lebih 2% dari Luas Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari Hutan, Rawa, Sungai, Danau, Genangan Air, Pantai dan Tanah lainnya.

Gambar 1.2. Peta Administratif Kabupaten Sukamara



Kabupaten Sukamara memiliki topografi yang relatif rata dengan ketinggian 0 – 100 m, dengan kemiringan 0 – 15 %. Selengkapnya per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Topografi Kabupaten Sukamara

No.	Kecamatan	Tinggi Dari Permukaan Laut (Meter)	Kemiringan (%)
1.	Jelai	0 – 25	0 – 8
2.	Sukamara	0 – 100	8 – 15
3.	Balai Riam	7 – 100	8 – 15
4.	Pantai Lunci	0 – 25	0 – 8
5.	Pemata Kecubung	7 – 100	8 – 15

Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2006

Secara umum Kabupaten Sukamara termasuk daerah beriklim tropis, dipengaruhi oleh musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Suhu udara berkisar antara 27,4° C sampai 31,7° C dengan kelembaban udara berkisar antara 83 – 89 % dan curah hujan sebesar 2.142 mm/tahun. Dengan ketinggian 6,4 m dari permukaan laut (dpl). Perairan Sukamara yang terdiri dari perairan laut dan perairan umum memiliki potensi yang besar, sedangkan wilayah daratan sangat cocok untuk tanaman pangan dan perkebunan.

1.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara sampai saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Kondisi ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor tersebut sebesar 74,38 % dari seluruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2006, yang secara nyata juga ditunjukkan oleh peranannya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh bergairahnya para pelaku ekonomi pada sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan, sub sektor kehutanan dan juga sub sektor tanaman bahan makanan. Walaupun pada tahun 2006 sub sektor tanaman bahan makanan perkebunan dan peternakan mengalami penurunan laju pertumbuhan. Akan tetapi sub sektor kehutanan dan perikanan mengalami laju pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu masing-masing sebesar 20,47% dan 7,40 % dibanding tahun 2005 dimana sub

sektor kehutanan mengalami penurunan laju pertumbuhan hingga -2,51% dan perikanan hanya 0,28%.

Sektor pertanian masih merupakan tumpuan utama bagi perekonomian Kabupaten Sukamara yang secara keseluruhan memberikan kontribusi sebesar 74,38 % dari seluruh PDRB. Jika dikaji lebih jauh, pada tahun 2006 ada beberapa sektor yang mengalami laju pertumbuhan secara riil yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, dimana masing-masing mengalami penurunan laju pertumbuhan riil sebesar 3,96 % dan 7,50% dibanding tahun 2005 yang sebesar 4,46% dan 8,10%.

Namun demikian ke tujuh sektor yang lain mengalami pertumbuhan riil yang cukup signifikan dibanding tahun 2005, dimana sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan 9,87%, sektor industri pengolahan sebesar 5,30%, sektor listrik dan air bersih sebesar 76,48%, sektor bangunan sebesar 14,15%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,24%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 5,77%, sektor jasa-jasa sebesar 13,05%.

Dengan demikian jika dilihat secara keseluruhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukamara Tahun 2006 dibanding tahun 2005 ternyata ke sembilan sektornya mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup positif yaitu sebesar 5,27% dibanding tahun 2005 yang sebesar 4,90%. Ini artinya bahwa seluruh produksi barang dan jasa di Kabupaten Sukamara meningkat sebesar 5,27% dibanding tahun 2005. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2

PDRB Kabupaten Sukamara Tahun 2004 – 2006 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Harga Berlaku	Harga Koston 2000	Pertumbuhan Nyata (%)
2004	581.024,24	453.209,81	6,48
2005	662.695,29	475.434,01	4,90
2006	747.217.11	500.505,37	5,27

Sumber: BPS Kabupaten Sukamara Tahun 2006

1.6. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Strategi membangun yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2003-2008 :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia mengarah kepada tenaga siap pakai melalui peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, pemuda dan perempuan.
2. Mengikutsertakan masyarakat, swasta dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Menerapkan mekanisme pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Menciptakan kemudahan iklim berusaha yang kondusif.
5. Memanfaatkan tata ruang sesuai dengan peruntukan sektor jasa, industri, perdagangan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan.

1.7 Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

Pokok-pokok kebijakan pembangunan lingkungan hidup ditetapkan dengan mengacu kebijaksanaan nasional yang disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Sukamara, meliputi :

- ▶ Memadukan lingkungan dan pembangunan di tingkat kebijaksanaan, perencanaan dan pengelolaan
- ▶ Mengelola Sumberdaya Alam secara rasional dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam bentuk penyusunan rencana tata ruang
- ▶ Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan SOP serta pengawasannya
- ▶ Pengelolaan sampah dengan teknologi ramah lingkungan
- ▶ Reklamasi dan Rehabilitasi Lingkungan
- ▶ Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia dengan mengikutsertakan personil pada Diklat/Kursus masalah lingkungan.
- ▶ Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan dunia usaha

1.8 Kebijakan Pendanaan Lingkungan

Di tahun 2007, dana pengelolaan lingkungan tidak hanya berada pada instansi pengelola lingkungan hidup (Bappeda Kabupaten Sukamara) tetapi juga pada instansi lain yang menangani masalah yang terkait dengan lingkungan diantaranya Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola Bappeda Kabupaten Sukamara sendiri di tahun 2007 adalah sebesar Rp. 711.000.000,0 Jumlah anggaran ini relatif lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.9 Kebijakan Rencana Tata Ruang

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diutarakan di atas diperlukan strategi yang mampu mengatur dan mengendalikan ruang secara terpadu dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya secara optimal, melalui :

1. Penegasan fungsi kawasan, baik yang bersifat lindung maupun budidaya dalam suatu pola pemanfaatan ruang.
2. Pengembangan potensi sektor-sektor unggulan (*driving force*) yang mampu meningkatkan perekonomian wilayah.
3. Menciptakan peluang bagi pusat-pusat pertumbuhan agar dapat berperan sebagai pembangkit pertumbuhan bagi wilayah-wilayah belakangnya.
4. Menyeraskan laju perkembangan antar wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta memperluas keterkaitan ekonomi dan ruang antar dan intra wilayah.
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara arif dengan orientasi pada perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan melalui pelibatan masyarakat secara aktif, baik perorangan maupun kelompok masyarakat (*community based development*).

1.10 Kebijakan Sosial Ekonomi dan Budaya

Strategi pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang memadukan upaya pembangunan dengan pelestarian lingkungan, memandang penduduk sebagai unsur utama untuk mengevaluasi faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya yang mempengaruhi penggunaan Sumberdaya Alam. Hal tersebut dimungkinkan karena penduduk memegang peran utama dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subyek yang menjalankan roda pembangunan.

Sebagai objek, penduduk merupakan sasaran yang harus ditingkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas ini tidak hanya terbatas pada kesejahteraan ekonomi tetapi juga seluruh bidang kehidupan. Dengan demikian, konsep pembangunan harus merupakan suatu konsep yang bertujuan membangun kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupan secara menyeluruh dan proporsional.

Tugas yang dihadapi penduduk sebagai subyek pembangunan pada dasarnya adalah menggulirkan roda pembangunan sehingga sasaran pembangunan dapat tercapai. Termasuk ke dalam tugas tersebut adalah bagaimana mewujudkan kondisi pembangunan yang terarah dan berkesinambungan. Tentunya, untuk menciptakan keadaan tersebut perlu konsep pembangunan yang berwawasan masa depan. Dengan pengertian bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi menciptakan kesejahteraan pada saat ini saja tetapi juga memperhatikan kesejahteraan yang mungkin dicapai pada masa mendatang.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa pembangunan tidak hanya semata-mata mengeksploitasi sumber daya untuk meningkatkan

kualitas hidup pada masa sekarang ini. Pembangunan juga harus merehabilitasi sumber daya sehingga paling tidak kondisi sumber daya pada masa yang akan datang sama dengan kondisi sekarang. Disinilah letak keterkaitan antara penduduk sebagai subjek pembangunan dan penduduk sebagai objek pembangunan. Penduduk harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan sebagai sasaran pembangunan kualitas hidupnya dengan memanfaatkan alam seoptimal mungkin dan keharusan mengkondisikan pembangunan yang stabil dan berkeseluruhan dengan mempertahankan kelestarian alam. Sudah barang tentu setiap aspek kependudukan mempunyai pengaruh yang berbeda dalam pembangunan, baik sebagai subjek maupun pengaruh yang berbeda dalam pembangunan. Seluruh aspek kependudukan harus dikendalikan sehingga peran gandanya bisa selaras. Dengan perkataan lain, kepentingannya sebagai objek tidak mengalahkan perannya sebagai subjek, demikian pula sebaliknya.

Kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sosial budaya merupakan suatu sistem yang melembaga sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia;
2. Usaha kesejahteraan sosial mencakup semua program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan mengembangkan kesejahteraan sosial, dilaksanakan sebagai tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah;
3. Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan sosial sehingga mampu mendukung tumbuh kembangnya sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
4. Pengutamaan fungsi pencegahan dan pengembangan, fungsi rehabilitasi dan bantuan;

5. Pembinaan dan pengembangan keterpaduan dalam kerja sama intrasektoral dan intersektoral;
6. Pendayagunaan sumber kesejahteraan sosial dalam masyarakat secara optimal untuk meningkatkan daya mampu dan daya jangkau penanganan masalah sosial;
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya.

Bab 2

Isu Utama Lingkungan Hidup



Sumber :
Bappeda Kabupaten Sukamara

BAB II

ISU UTAMA LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan diversifikasi ekonomi menyebabkan isu pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam menjadi penting di Kabupaten Sukamara saat ini. Hal ini tidak hanya terpusat pada proses ekologi yang vital dan konservasi genetika keanekaragaman hayati, akan tetapi juga pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien. Dengan demikian isu ini akan mengarah untuk memperbaiki semua aspek pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam.

Keadaan lingkungan di Kabupaten Sukamara dari tahun ke tahun cenderung mengalami kemunduran bahkan kerusakan. Beberapa penyebab kemunduran / kerusakan lingkungan adalah :

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang menyebabkan tingginya tekanan pada lingkungan.
2. Bertambahnya aktivitas pembangunan yang cenderung mengubah lingkungan alamiahnya.
3. Hutan yang gundul menyebabkan erosi, longsor, dan banjir serta sedimentasi di bagian bawah,
4. Kondisi daerah resapan hilang atau berkurang fungsinya,
5. Banyaknya limbah-limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan
6. Eksploitasi sumberdaya alam termasuk bahan tambang secara berlebihan, seperti penambangan pasir kuarsa.
7. Perilaku manusia masih berorientasi ekonomi dalam memandang sumberdaya alam.
8. Di beberapa daerah krisis air bersih.

Berikut adalah identifikasi beberapa isu aktual lingkungan hidup Kabupaten Sukamara tahun 2007 yang dianalisis dengan metode PSR (*Pressure–State–Response*):

2.1. Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

Permasalahan kesehatan pada hakekatnya tidak hanya terbatas pada permasalahan kedokteran secara klinis saja, tetapi juga dalam skala yang lebih luas, yaitu permasalahan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, titik berat pemecahan masalah kesehatan hingga saat ini dirasa masih kurang seimbang. Karena cenderung lebih difokuskan pada upaya penyembuhan penyakit yang diderita tiap individu saja, sehingga beberapa kegiatan yang diselenggarakan sebagai upaya pemecahan permasalahan kesehatan masyarakat masih belum menunjukkan hasil yang optimal, terbukti dengan relatif masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular pada masyarakat, masih rendahnya sarana dan prasarana kesehatan seperti tenaga medis, toko obat, apotik, rumah sakit, poliklinik, puskesmas, dan tenaga medis di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sukamara. Kondisi masyarakat Kabupaten Sukamara sendiri secara umum masih rendah tingkat kesehatannya. Kesadaran serta pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang sehat dan bergizi juga masih perlu ditingkatkan. Beberapa permasalahan dalam kesehatan masyarakat Kabupaten Sukamara adalah penyakit Malaria. Pada tahun 2006 kasus penyakit malaria menyerang di pada tiga Kecamatan yaitu kecamatan Jelai, Sukamara dan Balai Riam. Di Kecamatan Jelai kasus malaria terjadi kasus gejala klinis, 150 kasus dinyatakan positif malaria. Di Kecamatan Sukamara, ditemukan 400 kasus positif malaria dan Kecamatan Balai Riam jumlah penderita penyakit Malaria sebanyak 381 kasus.

Kecamatan Sukamara kondisi daerahnya memang sangat mendukung perkembangan vektor malaria. Sehingga penyebaran penyakit ini cepat menular kepada warga lain. Sementara, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara mengadakan penyuluhan kesehatan lingkungan serta bahaya dari penyakit malaria. Dinkes juga telah melakukan penyemprotan, pemeriksaan jentik nyamuk.

2.2. Banjir dan Abrasi Pantai

Sebagai kota yang merupakan dataran rendah, permasalahan banjir patut untuk diwaspadai. Kabupaten Sukamara dialiri 2 (dua) buah sungai yaitu Sungai Jelai dan Sungai Mapam, selain itu ada juga beberapa sungai kecil. Bencana banjir hampir selalu terjadi tiap tahunnya di Kabupaten Sukamara, meskipun tidak sampai pada tahap yang membahayakan terutama pada saat curah hujan tinggi. Permasalahan banjir ini ternyata masih belum mampu dapat dikendalikan sebagaimana mestinya, walaupun telah dibenahi berbagai sarana untuk pengendalian banjir.

Penyebab dari permasalahan banjir di Kabupaten Sukamara ini tak lepas dari berbagai faktor, di samping faktor curah hujan dan fluktuasi gelombang laut adalah seperti pembukaan lahan pada hulu sungai yang menyebabkan erosi sehingga terjadi sedimentasi dari erosi permukaan sungai. Hal tersebut mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Kurangnya kapasitas tampung sungai yang akhirnya menjadi pemicu terjadinya banjir di daerah ini. Faktor adanya pembuangan dan penumpukan sampah pada sungai dan saluran drainase kota juga dapat menyebabkan terjadinya banjir, karena hal ini akan memperlambat dan menyumbat aliran air. Hal ini tentu bakal menimbulkan berbagai macam kerugian di Kabupaten Sukamara. Permasalahan ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah dan instansi terkait sebagai pembuat kebijakan serta seluruh masyarakat Kabupaten Sukamara.

Tingkat abrasi pantai yang terdapat di Kabupaten Sukamara mengakibatkan terkikisnya alur-alur pantai tersebut sudah tergolong tinggi selama ini. Abrasi pantai dinilai sudah sampai pada kondisi yang membahayakan keselamatan warga setempat, tingkat abrasi pantai yang cukup parah terjadi di Kecamatan Jelai tersebut mengakibatkan hancurnya bangunan gedung sekolah dasar, SLTP dan fasilitas umum lainnya yang berada di sekitar pantai namun bila hal itu terus dibiarkan berlangsung, dikhawatirkan dapat menghambat pengembangan potensi kelautan di Kabupaten Sukamara secara keseluruhan, baik pengembangan hasil produksi perikanan maupun pemanfaatan sumber daya kelautan lainnya.

Berbagai upaya dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Sukamara, namun permasalahan belum teratasi secara menyeluruh. Beberapa permasalahan pokok masih akan dihadapi dan

menjadi prioritas untuk ditangani antara lain mencakup semakin menipisnya persediaan sumber daya alam yang ada akibat praktek perambahan, perampasan, pencurian, degradasi, penebangan liar, perburuan gelap, perusakan habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang berdampak negatif terhadap kelestarian ekosistem secara keseluruhan. Hal ini antara lain ditandai oleh masih tingginya tingkat kerusakan hutan dan lahan oleh maraknya pencurian kayu, kebakaran hutan dan lahan, semakin berkurangnya populasi satwa liar dan lain-lain.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran (*awareness*) akan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan lestari, serta lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) dibarengi oleh kemiskinan akibat krisis ekonomi yang berdampak buruk bagi upaya pembangunan sumber daya alam serta mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Permasalahan pokok lainnya adalah penambahan jumlah penduduk dan upaya pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita untuk mencari alternatif sumber-sumber pendanaan pembangunan yang tidak tergantung dari produksi yang tidak mengekstraksi sumber daya alam, terutama pada sektor kehutnan, pertambangan dan lain-lain. Ketergantungan ini terjadi karena daerah memandang sumber daya alam sebagai tumpuan utama untuk meningkatkan PAD. Apabila praktek tersebut dilaksanakan tanpa memperhatikan aspek berkelanjutan, maka yang terjadi adalah bencana ekologis (*ecological disaster*) yang sangat parah serta menipisnya persediaan sumber-sumber daya alam yang tidak terbarukan (*non renewable resources*).

Tingkat pencemaran lingkungan masih tetap tinggi yang ditandai oleh tercemarnya sumber air masyarakat (air tanah dan air permukaan), serta tercemarnya perikanan. Masalah pencemaran ini akan semakin sulit karena kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta menjaga kualitas lingkungan hidup masih rendah, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan pengusahaan sumber daya alam tambang.

Selain itu, dalam hal pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup masih dirasakan belum optimalnya penerapan teknologi ramah lingkungan; belum ada kesepakatan model atau metode

perhitungan biaya lingkungan; dan belum terkoordinasinya lembaga pendanaan lingkungan hidup.

Permasalahan bencana alam yang belakangan ini bila diperhatikan telah banyak terjadi di berbagai daerah telah menghancurkan banyak pranata sosial dan ekonomi termasuk juga sarana dan prasarana yang telah dibangun. Dapat dicermati bahwa salah satu penyebab utama dari bencana alam tersebut adalah aktivitas manusia yang mengeksploitasi lingkungan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lain pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu penanganan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang komprehensif perlu diprioritaskan agar degradasi lingkungan hidup serta bahaya bencana alam dapat dihindarkan. Potensi konflik antar Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber daya ekonomi juga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.

Dalam hal ini penataan kelembagaan dan penegakan hukum, masalah lain yang dihadapi adalah masih belum adanya kemauan yang berarti dalam hal penataan kelembagaan dan penegakan dan penegakan hukum; penanganan permasalahan sumber daya alam masih bersifat sektoral; pengakuan lembaga adat dan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam masih belum terealisasi; kurang optimalnya kemitraan dan akses masyarakat adat dan lokal dalam pola pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup; dan belum diterapkannya beberapa perjanjian internasional yang telah disepakati dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah. Selain itu, upaya penegakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup juga masih ditandai oleh sedikitnya kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang disidangkan maupun dimenangkan oleh pihak yang dirugikan.

Disamping itu, bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam masih terbatas pada pemberian informasi dan pengajuan keberatan, belum terlibat penuh dalam proses pengambilan keputusan; serta tidak jelasnya mekanisme peran serta masyarakat yang bisa dilakukan.

Dengan latar belakang tersebut, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Sukamara hendaknya diarahkan kepada upaya penegakan hukum secara konsisten dan peningkatan peran masyarakat. Kebijakan ini sesuai dengan perubahan paradigma dalam sistem

pemerintahan yang menghendaki adanya suatu sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih desentralistis dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang antara lain mensyaratkan praktek *good governance* yang didasarkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu Tingkat abrasi pantai yang mengakibatkan terkikisnya alur-alur pantai terutama di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara sudah tergolong tinggi selama ini. Abrasi pantai dinilai sudah sampai pada kondisi yang membahayakan keselamatan warga setempat, namun bila hal itu terus dibiarkan berlangsung, dikhawatirkan dapat menghambat pengembangan potensi kelautan di Kabupaten Sukamara secara keseluruhan, baik pengembangan hasil produksi perikanan maupun pemanfaatan sumber daya kelautan lainnya.

2.3 Lahan Kritis

Permasalahan lingkungan yang terus dan semakin menjadi perhatian serius yang dapat kita cermati secara bersama adalah pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah sehingga mempercepat degradasi tingkat kesuburan tanah, hal ini akan menambah lahan kritis di Kabupaten Sukamara. Permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan segala kebijakannya, akan tetapi juga harus menjadi tanggung jawab segenap unsur masyarakat di Kabupaten Sukamara.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jelas mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan di Kabupaten Sukamara. Sesuatu yang dikhawatirkan dimasa yang akan datang adalah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung yang tanpa terkendali. Berbagai kegiatan seperti pembukaan lahan berpindah, kegiatan pertanian, perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan ataupun jasa masih banyak yang belum sesuai dengan konsep lingkungan. Adanya upaya untuk memanfaatkan kawasan lindung menjadi areal budidaya semakin meningkat. Di samping itu juga adanya kecenderungan masyarakat menggunakan sistem ladang berpindah serta pembukaan lahan bagi keperluan pertanian dan kawasan terbangun.

Pada kawasan-kawasan tertentu terlihat kecenderungan perkembangan yang pesat dalam penggunaan alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian, ladang berpindah, pembangunan perumahan, jasa dan keperluan kegiatan lainnya. Dimana pada beberapa kecamatan ini yang semula mempunyai kawasan lindung yang cukup signifikan dengan daerah tangkapan air (*catchment area*) Kabupaten Sukamara yang seharusnya dipelihara atau dilestarikan, terlihat sudah mulai berubah fungsi dan dialihkan untuk peruntukan lain seperti untuk kegiatan-kegiatan perladangan dan kegiatan lainnya.

2.4 Air bersih

Pemakaian air bersih merupakan kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi penduduk secara rutin guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik buruknya pelayanan air bersih akan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku air untuk pengolahan lebih lanjut. Hingga saat ini sumber bahan baku air yang tersedia untuk diolah dan dijadikan air bersih, umumnya diambil dari sumber bahan baku air sungai. Penduduk yang menggunakan sarana air bersih sangat terbatas sekali hanya diperuntukkan pada salah satu kecamatan saja yaitu Kecamatan Sukamara, untuk 4 (empat) kecamatan yang berada di Kabupaten Sukamara masih belum menggunakan air bersih secara maksimal. Permasalahan serius yang sering muncul berkaitan dengan penyediaan air bersih adalah terjadinya interusi air laut pada musim kemarau, terutama di daerah Kecamatan Jelai.

Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Kabupaten Sukamara berusaha semaksimal mungkin, untuk membangun jaringan air bersih di daerah yang belum mendapatkan fasilitas air bersih.

Bab 3

Air

Sungai merupakan salah satu komponen pokok dalam menunjang kehidupan manusia, untuk itu menjaga kualitas air agar tidak tercemar perlu peran serta masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai agar tidak tercemar

Keterangan Foto :
Sungai di manfaatkan sebagai
tempat wisata

Sumber :
Bappeda Kabupaten Sukamara

BAB III AIR

3.1 Kondisi Kuantitas dan Kualitas Air

Air merupakan salah satu sumber daya terpenting bagi kehidupan manusia dalam melakukan berbagai kegiatan yang dilakukannya, termasuk kegiatan pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan telah meningkatkan kebutuhan sumber daya air. Di lain pihak, ketersediaan sumber daya air semakin terbatas, bahkan di beberapa tempat dikategorikan berada dalam kondisi kritis. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pencemaran, penggundulan hutan, kegiatan pertanian yang mengabaikan kelestarian lingkungan, dan perubahan fungsi daerah tangkapan air. Di banyak daerah terjadi kecenderungan penurunan kuantitas dan kualitas air, bahkan sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Walaupun ketersediaan air dari waktu ke waktu relatif tetap karena mengikuti daur hidrologi, keadaan dan kualitasnya yang kurang memenuhi syarat menyebabkan pemakaian dan pemanfaatannya menjadi terbatas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air untuk berbagai kebutuhan, kelestarian sumber daya air perlu dijaga. Prinsip dasar yang berkaitan dengan pemanfaatan air yang efisien juga harus mempertimbangkan aspek daya dukung dan konservasi sumber daya air.

3.1.1 Curah Hujan

Salah satu komponen utama dalam daur hidrologi adalah curah hujan. Pada tabel 3.1 terlihat bahwa curah hujan tertinggi di tahun 2007 terjadi pada bulan April, sementara itu rata-rata curah hujan tahunan dan rata-rata jumlah hari hujan cenderung menurun dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya.

Tabel 3.1. Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Sukamara

Bulan	Curah Hujan								
	2004			2005			2006		
	Curah Hujan (mm)		Hari Hujan (hh)	Curah Hujan (mm)		Hari Hujan (hh)	Curah Hujan (mm)		Hari Hujan (hh)
	Jlh	Max		Jlh	Max		Jlh	Max	
Januari	414,3	-	27	112,0	-	20	230,7	19	-
Februari	138,9	-	16	267,5	-	23	404,2	22	-
Maret	247,7	-	25	296,6	-	20	252,3	21	-
April	275,6	-	21	406,3	-	18	224,8	19	-
Mei	200,6	-	12	162,0	-	13	136,1	16	-
Juni	123,9	-	10	57,5	-	11	498,8	16	-
Juli	193,6	-	20	155,9	-	15	28,1	4	-
Agustus	-	-	-	125,4	-	12	-	2	-
September	124,8	-	10	164,9	-	12	60,7	4	-
Oktober	129,9	-	11	227,7	-	23	20,2	3	-
Nopember	147,5	-	18	427,6	-	24	291,2	17	-
Desember	289,5	-	23	234,4	-	23	345,6	21	-

Sumber : BMG

3.1.2. Sungai

Secara hidrologis dan sesuai dengan keadaan morfologinya, Kabupaten Sukamara dilintasi oleh sungai-sungai yang membentang dan mengalir seluruh kecamatan yang ada.

Tabel 3.2
Nama Sungai Alam di Wilayah Kabupaten Sukamara

No.	Nama Sungai	Lokasi
1.	Sungai Jelai	Kuala Jelai
2.	Sungai Mapam	Balai Riam
3.	Sungai Tangih	Balai Riam
4.	Sungai Bakung	Sukamara
5.	Sungai Tabuk	Sukamara

Sumber : Data Primer

Sungai Jelai mempunyai panjang 200 km dan lebar berkisar antara 150-200 m. Kedalaman rata-rata Sungai Mahakam berkisar 8-10 meter dengan debit air sungai di permukaan berkisar 375 m³ per detik. Pada beberapa meter di bawah permukaan air sungai, kecepatan arus lebih besar.

Gambar 3.1

Sungai Jelai, sumber air baku Kabupaten Sukamara



Sumber : Bappeda Kabupaten Sukamara (Subbid Pengairan, SDA dan LH 2007)

Sungai-sungai di wilayah Kabupaten Sukamara umumnya sangat tergantung pada curah hujan. Pada musim hujan debit airnya besar, sedangkan pada musim kemarau sangat kecil bahkan kering di beberapa tempat. Aliran sungai oleh masyarakat di daerah sungai Jelai dimanfaatkan untuk keperluan mandi cuci kakus masyarakat sehari-hari. Semua sungai tersebut mempunyai aliran air pasang surut seiring dengan pasang surut air laut.

3.1.3 Air Tanah

Air bawah tanah atau air tanah dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu air tanah dalam dan air tanah dangkal. Berdasarkan kondisi topografi dan struktur geologi di Kabupaten Sukamara, kedalaman air tanah umumnya berbeda-beda. Kedalaman air tanah dangkal umumnya berkisar rata-rata antara 1-6 meter dari muka tanah, sedangkan air tanah dalam terdapat pada lapisan pembawa air (akuifer) yang berupa batu pasir dengan kedalaman bervariasi antara 30 hingga 110 meter dari muka air tanah. Potensi air tanah Kabupaten Sukamara merupakan daerah imbuhan atau resapan air bawah tanah. Berdasarkan konfigurasi akuifer, arah aliran air tanah dari Barat ke Timur kurang lebih tegak lurus terhadap jurus kemiringan lapisan batu pasir yang bertindak sebagai akuifer. Air tanah tersebut terutama berasal dari resapan air hujan yang jatuh di atas singkapan batupasir. Oleh karena itu besarnya resapan selain dipengaruhi oleh besarnya limpahan permukaan (run off) dan penguapan, juga tergantung luas singkapan batupasir.

Berdasarkan hasil studi "Potensi Air Baku Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau" yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2004, potensi air tanah di Kabupaten Sukamara di bagi menjadi 3 zona untuk potensi air tanahnya, yaitu :

1. Potensi air tanah sangat tinggi, umumnya terletak pada daerah sepanjang sungai besar yaitu : Sungai Jelai. Potensi air yang besar ini terletak dari bantaran sungai sampai beberapa kilometer dari bantaran sungai ke bagian Barat dan Timur.
2. Potensi air tanah tinggi, yang terdapat setelah daerah potensi air tanah sangat tinggi berangsur-angsur potensi air tanah berkurang sampai potensi air tanah yang tinggi.
3. Potensi air tanah rendah dimana merupakan daerah yang agak menjauhi sungai-sungai besar atau diantara dua sungai dan dataran selatan dari Peg. Schwamer.

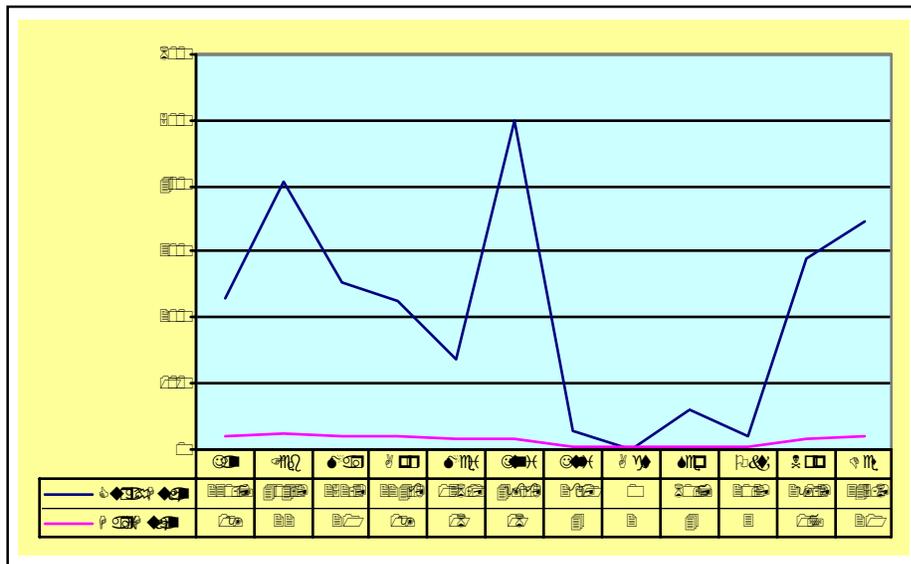
3.2 Tekanan Terhadap Kuantitas dan Kualitas Air

3.2.1 Erosi dan Sedimentasi

Curah hujan sangat berpengaruh pada proses terjadinya erosi. Semakin tinggi intensitas hujan yang bersamaan dengan lamanya periode hari hujan jatuh, maka kemungkinan erosi yang akan terjadi semakin besar. Wilayah Kabupaten Sukamara mempunyai iklim hutan hujan tropis. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Pebruari sebanyak 404,2 mm dan bulan Juni yaitu sebanyak 488,8 curah hujan, sedangkan banyaknya hari hujan terjadi pada bulan Pebruari yaitu sebanyak 22 kali hari hujan.

Gambar 3.2

Menunjukkan curah hujan tertinggi di tahun 2006



3.2.2 Kebutuhan Air Bersih

Ketersediaan air bersih untuk penduduk Kabupaten Sukamara merupakan salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Sukamara. Terus bertambahnya tingkat permintaan air bersih bagi kepentingan domestik dan industri masih belum dapat diimbangi dengan kemampuan PDAM Sukamara untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut. Jumlah sambungan yang sudah dilayani oleh PDAM di tahun 2006 mengalami sebesar 372 Pelanggan.

Meski demikian peningkatan pelayanan masih diperlukan karena belum semua masyarakat dapat terlayani oleh air bersih. Kurangnya ketersediaan air bersih ini mengakibatkan banyaknya penduduk kota yang harus membeli air bersih untuk kepentingan air minum dan bahkan memanfaatkan sumber air yang ada seperti air sungai Jelai, Mapam, Sungai Bakung, dan Sungai Tangih secara langsung untuk memenuhi keperluan domestiknya (mandi, cuci, kakus/MCK) tanpa memperhatikan kualitas dan kelayakan sumber air tersebut. Ini terutama dilakukan oleh penduduk yang bertempat tinggal di atas atau di bantaran sungai.

3.3 Dampak Perubahan Kuantitas dan Kualitas Air

Terjadinya penurunan kualitas air (pencemaran) dalam wilayah Kabupaten Sukamara disebabkan oleh banyak penyebab/tekanan. Penyebab tersebut bervariasi untuk setiap macam ekosistemnya, seperti untuk pencemaran sungai penyebabnya adalah kegiatan Rumah Tangga / domestik / pertanian / perikanan, pasar, transportasi sungai (kapal/perahu nelayan) serta kerusakan daerah catchment / sempadan dan badan sungai. Dari sungai yang ada, tampak sungai Jelai menunjukkan kondisi pencemaran yang sedang - berat dengan penyebab yang sangat kompleks. Rincian dari masing kegiatan yang dapat menjadi penyebab pencemaran sungai Jelai dan beberapa sungai utama di Sukamara adalah sebagai berikut:

3.3.1. Limbah Rumah Tangga/ Domestik dan Pasar

Hampir sebagian besar sepanjang bantaran sungai dan anak sungai utama di Kabupaten Sukamara terdapat daerah pemukiman. Kondisi pemukiman makin lama tampak terus berkembang sejalan perkembangan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Masyarakat yang tinggal pada daerah tersebut tampak sebagian ada yang menggunakan sungai sebagai tempat aktivitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) serta tempat membuang sampah. Berdasarkan prediksi kasar beban pencemaran dapat didekati menggunakan standar WHO untuk limbah padat dan pendekatan perhitungan NKLD untuk limbah cair. Berdasarkan standar WHO diatas, kapasitas produksi sampah untuk masyarakat menengah ke bawah adalah 250 kg/orang/tahun untuk limbah padat.

Kondisi serupa untuk tahun 2006 ini diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan penambahan penduduk dan kebutuhan akan lahan perumahan,

serta didorong oleh sebagian besar rumah mereka berada pada daerah sempadan sungai dengan dapurnya menghadap ke sungai sehingga buangan rumah tangga lebih gampang dibuang ke sungai, serta kurang rasa kesadaran akan kebersihan sungai dan tidak menyadari bahaya yang mungkin timbul akibat perbuatannya. Indikasi ke arah tersebut secara visual sudah tampak terjadi di muara Sungai Jelai, karena air sungai tampak sangat kotor (keruh), banyak tumpukan sampah dan bangkai kapal, serta kadang-kadang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika tidak ada penerbitan perumahan liar di daerah sempadan sungai dan penyediaan TPS serta mobil pengangkutan sampah yang mencukupi yang mungkin dapat diakses ke lokasi tersebut, atau jika ada frekuensi pengambilan sampahnya sangat terbatas disebabkan kekurangan armada dan tenaga, atau kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kearifan masyarakat tentang kebersihan lingkungan daerah sempadan sungai, maka beban pencemar dari sektor domestik akan sulit diatasi.

3.3.2. Kerusakan Daerah Catchment, Sempadan Sungai dan Badan Sungai

Ketersediaan air sungai utama dalam Kabupaten Sukamara secara kuantitas dan kualitas sangat ditentukan oleh keberadaan dan kondisi daerah catchment hulu/DAS hulunya. Kondisi daerah hulu tersebut tampak sudah mulai terganggu/ rusak oleh berbagai aktivitas manusia seperti penebangan kayu secara liar, pembukaan hutan untuk perkebunan, dan pengambilan Galian C, belum termasuk penambangan liar oleh masyarakat. Di samping itu, juga telah terjadi kerusakan pada badan sungai baik pada palung dan tebing sungai akibat pengambilan galian C atau juga tebing sungai rusak terkikis secara alamiah karena banjir di daerah hulu dan daerah tengahnya.

Adanya kerusakan tersebut tentu berakibat pada tingginya konsentrasi TSS di daerah hilirnya. Kontribusi bahan tersuspensi tersebut lebih banyak terjadi pada musim hujan akibat erosi permukaan, sementara pada musim kemarau mungkin berasal dari proses pengambilan sirtukil (bahan galian C) pada tebing dan palung sungai. Berbagai bahan buangan dari aktivitas di atas akan masuk ke sungai, sehingga sungai tersebut tidak lagi mampu memulihkan (recovery) dirinya dengan optimal baik secara fisika, kimia dan biologi. Akibatnya, telah terjadi peningkatan konsentrasi bahan pencemar tersebut ke arah hilirnya.

Terjadinya pencemaran air di sungai utama dalam Kabupaten Sukamara oleh berbagai aktivitas manusia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya akan dapat menimbulkan dampak yang cukup berarti seperti berkurangnya keindahan sungai, terbatasnya persediaan sumber air bersih untuk air minum dan mandi, karena air telah berbau tidak sedap dan berwarna keruh. Dampak lain yang mungkin terjadi adalah: sumber air PDAM telah terkontaminasi oleh bahan pencemar serta jumlah airnya pada musim kemarau sangat kurang dan di musim hujan mengandung TSS yang tinggi. Akibatnya, proses pengolahan air menjadi makin lama, harga pengolahannya menjadi mahal dan jumlah air yang dapat diproduksi sangat terbatas.

Jika kondisi pencemaran ini lebih meningkat lagi di masa datang, maka akan mungkin dapat terjadi penurunan keragaman hayati dari biota sungai. Beberapa diantara ikan air tawar yang ada yang tidak menyukai kondisi demikian dan terbatasnya jumlah mikroalga air tawar sebagai pakan alami untuk ikan dan biota air lainnya, bahkan dapat juga diantara mikroalga tersebut dapat mempercepat terjadinya eutrofikasi sungai bersamaan dengan peningkatan biomassa gulma air. Akibatnya, dapat mempercepat terjadi pendangkalan dan penyempitan sungai yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan biota dalam sungai tersebut serta timbulnya berbagai faktor penyakit.

3.3.2 Pencemaran Air

Pemantauan kualitas air di Kabupaten Sukamara masih terbatas pada Sungai Jelai.

Tabel. 3.3. Hasil Pengujian Pemantauan Kualitas Air Sungai Jelai

No.	Parameter	Satuan	Hasil Pemantauan							Baku Mutu Kelas II
			Juli 2007							
			1	2	3	4	5	6	7	
1	Temperatur	⁰ C	27,1	26,9	26,4	26,4	27,1	27,1	27,2	deviasi 3
2	pH	-	6,38	6,31	5,74	6,02	6,11	6,04	5,98	6-9
3	Conductivity (DHL)	μ mhos/cm	16,02	14,6	14,43	15,63	15,94	14,56	15,20	-
4	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/l	50	69	77	63	73	64	44	1000
5	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/l	192	232	224	169	228	225	186	50
6	BOD ₅	mg/l	7,2	3,2	3,2	3,0	3,2	3,2	6,0	3
7	COD	mg/l	14,5	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	11,6	25
8	DO	Mg/l	3,41	3,02	3,10	3,25	2,83	3,14	3,50	4
9	Nitrit (NO ₂)	mg/l	0,013	0,012	0,011	0,009	0,010	0,013	0,014	0,06
10	Nitrat (NO ₃)	mg/l	0,035	0,027	0,072	0,011	0,043	0,051	0,037	10
11	Amoniak Bebas (NH ₃ -N)	mg/l	0,278	0,099	0,141	0,059	0,014	0,083	0,012	-
12	Phospat (PO ₄)	mg/l	0,031	0,032	0,022	0,039	0,028	0,028	0,031	0,2
13	Sulfat (SO ₄)	mg/l	2,318	2,224	4,637	2,058	2,685	2,839	2,815	-
14	Phenol	mg/l	0,071	0,035	0,046	0,006	0,083	0,060	0,004	0,001
15	Minyak/Lemak	mg/l	8	9	10	16	6	13	8	1
16	Detrit	Mg/l	0,04	0,060	0,033	0,064	0,047	0,054	0,034	200
17	Fecal Coli	APM/100 ml	4	4	4	9	4	4	20	1000
18	Total Coliform	APM/100 ml	4	4	4	11	4	7	22	1000

Sumber : Laboraturum 2007

Ket : 1. Sukaramai Hulu 2. Sukaramai Ujung, 3. Kelurahan Padang, 4. Pelabuhan Sped, 5. Kelurahan Mendawai, 6. Pelabuhan, dan 7. Jembatan.

Frekuensi pengambilan dan analisis contoh air dilaksanakan pada bulan Juli dengan menggunakan 18 parameter kunci. Secara umum dapat dikatakan bahwa air sungai yang ada belum mengalami pencemaran.

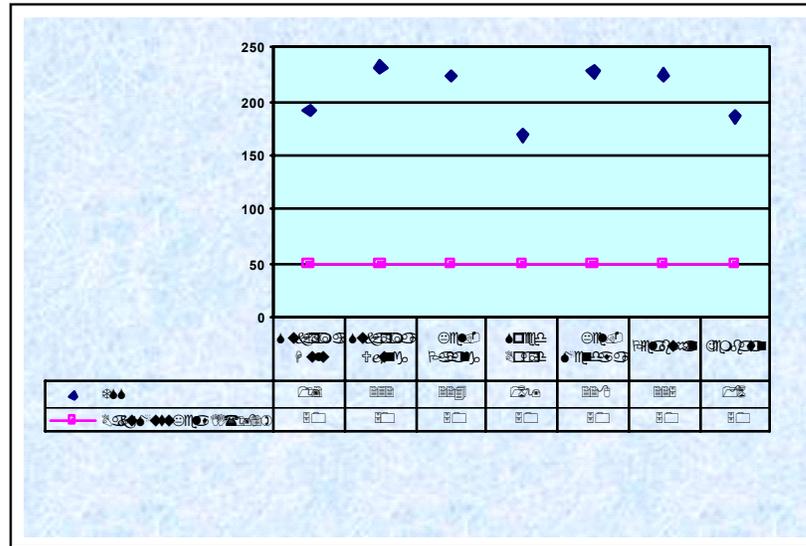
Berdasarkan hasil analisis kualitas air, diketahui terdapat tiga parameter yang melebihi ambang batas Kriteria Mutu Air Kelas II PP No.82 tahun 2001 yaitu: Residu Tersuspensi (TSS), BOD₅, Phenol dan Minyak/lemak (Tabel 3.3). Sedangkan parameter masih di bawah ambang batas baku mutu yaitu meliputi Parameter COD, DO, Nitrit, Nitrat dan Total Coliform tidak melebihi NAB (Nilai Ambang Batas) di semua lokasi pemantauan.

(1) Parameter TSS

Hasil pemantauan TSS sungai Jelai menunjukkan bahwa dua buah titik lokasi yaitu Sungai Mahakam dan Sungai Karang Asam tidak memenuhi kriteria mutu air Kelas 1 berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 (Gambar 3.3). Sedangkan nilai

konsentrasi TSS Sungai Karang Mumus masih memenuhi kriteria mutu air kelas II.

Gambar 3.3
Parameter TSS Sungai Jelai Tahun 2007

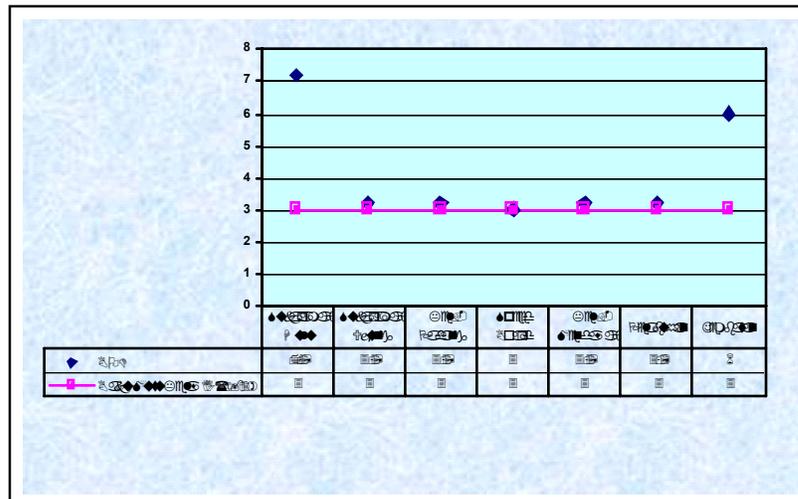


Sumber : Bappeda Kabupaten Sukamara (Subbidang Pengairan, SDA dan LH)

(2) Parameter BOD₅

Parameter BOD₅ di ketujuh titik pantau sungai Jelai menunjukkan bahwa semua titik pemantauan tidak memenuhi kriteria mutu air Kelas II berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 (Gambar 3.4).

Gambar 3.4
Parameter BOD₅ Sungai Jelai Tahun 2007

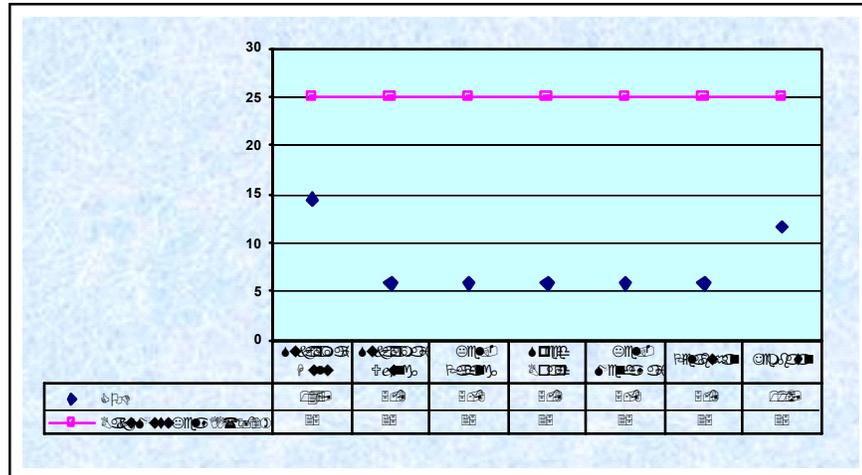


Sumber : Bappeda Kabupaten Sukamara (Subbidang Pengairan, SDA dan LH)

(3) Parameter COD

Hasil pengukuran parameter COD menunjukkan bahwa semua titik pantau sungai mempunyai kadar COD tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam kriteria mutu air Kelas II berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 (Gambar 3.5).

Gambar 3.5
Parameter COD Sungai Jelai Tahun 2007

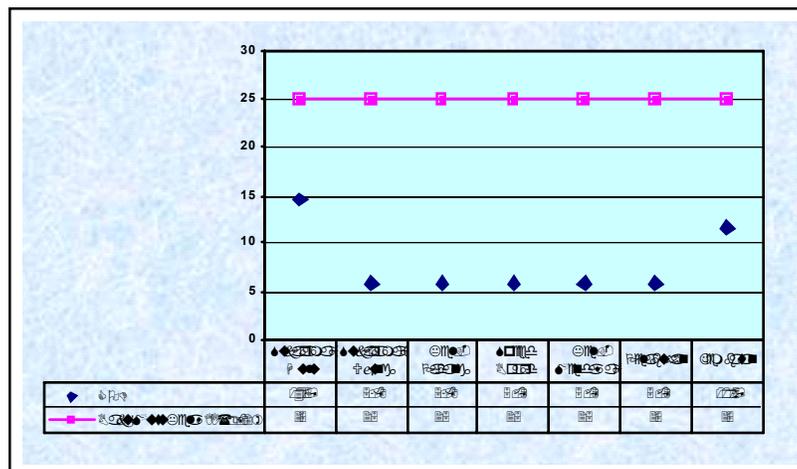


Sumber : Bappeda Kabupaten Sukamara (Subbidang Pengairan, SDA dan LH)

(4) Parameter DO

Kandungan oksigen (DO) terlarut pada ketujuh titik sungai hampir mendekati kriteria mutu air Kelas II berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 (Gambar 3.6).

Gambar 3.6
Parameter DO Sungai Jelai Tahun 2007



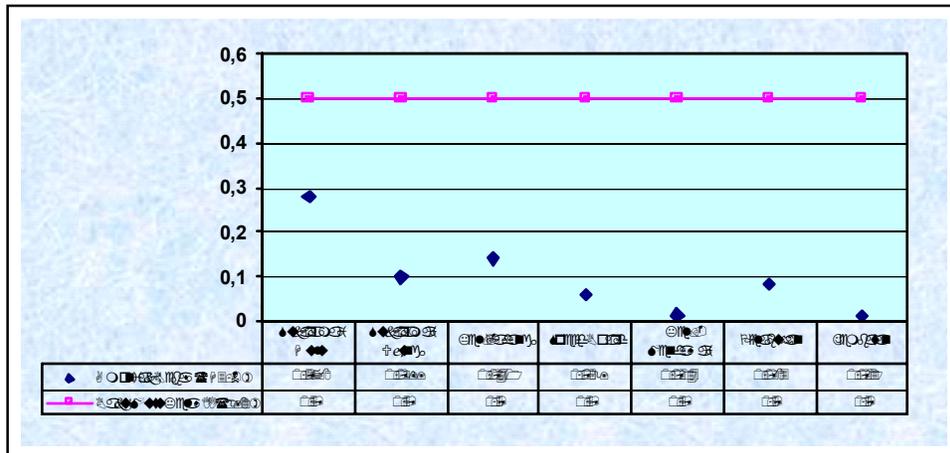
Sumber : Bappeda Kabupaten Sukamara (Subbidang Pengairan, SDA dan LH)

(5) Parameter Amoniak Bebas (NH₃-N)

Konsentrasi amoniak bebas ketujuh titik pantau sungai Jelai juga menunjukkan nilai di bawah ambang batas yang dipersyaratkan oleh mutu air Kelas II berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001, yaitu di atas 0.50 mg/l (gambar 3.7).

Gambar 3.7

Parameter Amoniak Bebas (NH₃-N) Sungai Jelai Tahun 2007



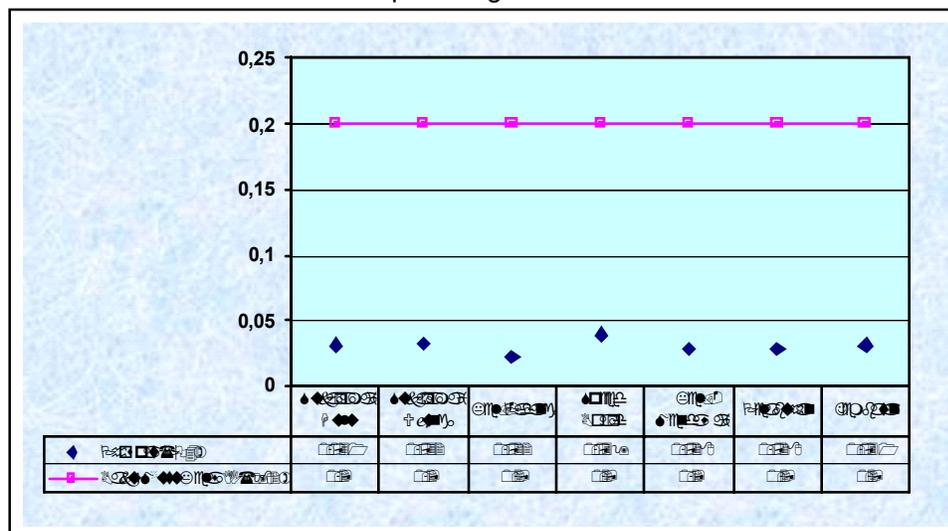
Sumber : Bappeda Kabupaten Sukamara (Subbidang Pengairan, SDA dan LH)

(8) Parameter Phosphat

Konsentrasi fosfat pada umumnya memenuhi kriteria mutu air Kelas II berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001. (Gambar 3.8).

Gambar 3.8

Parameter Phosphat Sungai Jelai Tahun 2007



Sumber : Bappeda Kabupaten Sukamara (Subbidang Pengairan, SDA dan LH)

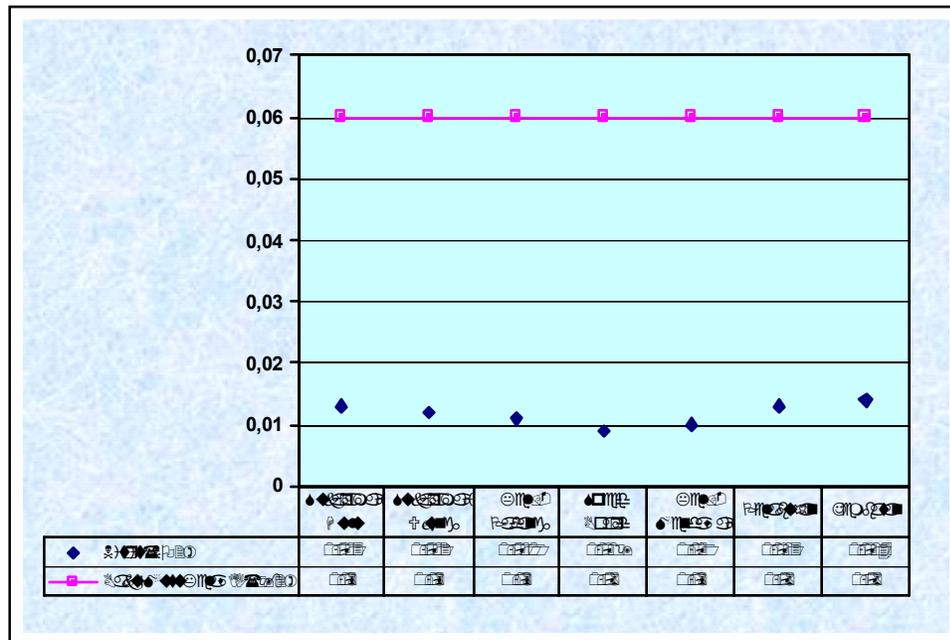
4. Sosialisasi tentang peraturan hukum yang berlaku terkait masalah pengelolaan limbah cair, produksi bersih, pengelolaan limbah cair domestik dan sanitasi lingkungan
5. Membuat peraturan daerah yang mengatur tentang ketentuan pengambilan air tanah (retribusi) dan izin pembuangan limbah cair.
6. Peningkatan kesadaran dan peranserta masyarakat untuk memelihara kebersihan dan kelestarian sungai.

(9) Parameter Nitrit

Konsentrasi nitrit pada ke tujuh titik pemantauan Sungai Jelai menunjukkan nilai yang tidak memenuhi kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP 82/2001. (Gambar 3.9).

Gambar 3.9

Parameter Nitrit Sungai Jelai Tahun 2007

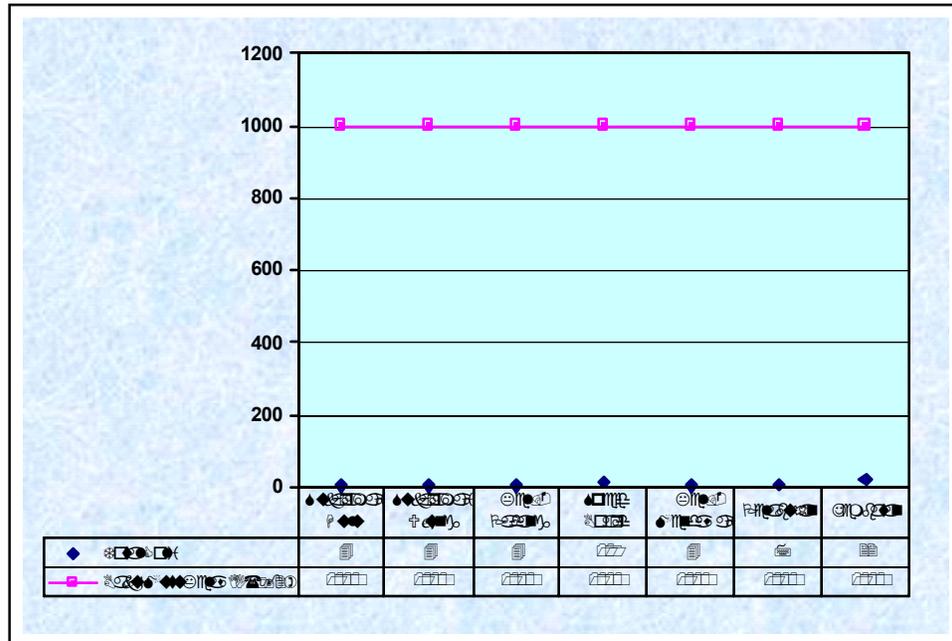


Sumber : Bappeda Kabupaten Sukamara (Subbidang Pengairan, SDA dan LH)

(10) Parameter Total Coliform

Total coliform yang diukur pada semua titik lokasi pantau sungai Jelai menunjukkan masih dibawah nilai baku mutu yang dipersyaratkan oleh PP 82 tahun 2001, ini menunjukkan bahwa sungai Jelai belum mengalami pencemaran limbah domestik (Gambar 3.10).

Gambar 3.10
Parameter Total Coliform Sungai Jelai Tahun 2007



Sumber : Bappeda Kabupaten Sukamara (Subbidang Pengairan, SDA dan LH)

3.4 Upaya Pengelolaan Sumber Daya Air

Berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan dalam upaya pengelolaan sumber daya air, antara lain:

1. Pengawasan terhadap sumber-sumber pencemar air; Pengawasan pengendalian pencemaran air saat ini masih terbatas pada beberapa industri Kelapa Sawit. Belum tercakup beban pencemaran yang berasal dari kegiatan industri lainnya atau industri kecil yang secara akumulasi berpotensi pula sebagai pencemaran di Sungai Jelai secara langsung maupun melalui badan-badan air lainnya.
2. Melakukan pemantauan kualitas air sungai-sungai alam yang tidak termasuk ke dalam program prokash
3. Mengidentifikasi kawasan-kawasan yang dianggap mempunyai fungsi sebagai kawasan resapan dan tampungan air, dan membeli (land banking) daerah-daerah yang mempunyai fungsi lindung.

Bab 4

Udara

Isu Lingkungan Hidup bukan saja yang disebabkan oleh alam, akan tetapi oleh ulah manusia itu sendiri yang tidak menjaga lingkungannya secara lestari, dalam penangannya memerlukan perhatian yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat

Keterangan Foto :
Kabut Asap akibat Kebakaran Lahan
Akibat Peldang berpindah

Sumber :
Bappeda Kabupaten Sukamara

BAB IV UDARA

4.1. Kondisi Kualitas Udara

4.1.1. Iklim

Secara umum wilayah Kabupaten Sukamara beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim basah (penghujan) dan musim kering (kemarau). Musim penghujan berkisar antara bulan oktober hingga bulan Mei dan sebaliknya musim kemarau berkisar antara bulan Juni hingga bulan September. Lamanya hari atau bulan setiap musim berfluktuasi, sehingga dikenal adanya istilah kemarau pendek atau panjang, begitu pula untuk musim penghujan.

Suhu udara berkisar antara 26,7 – 27,4 °C dengan kelembaban udara berkisar antara 83-89%. Banyaknya hari hujan tertinggi terjadi selama tahun Nopember 2006 s/d Oktober 2007 yaitu sebanyak 135 hari hujan atau rata-rata hari hujan sebanyak 11,25 hari hujan. Sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan April sebanyak 20 hari hujan. Tabel 4.1 menunjukkan keadaan curah hujan Nopember 2006 – Oktober 2007.

Tabel. 4.1. Keadaan Curah Hujan di Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2006-2007

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu Udara (°C)
Nopember 06	303	11	27,1
Desember 06	73	6	27,0
Januari 07	141	4	27,0
Februari 07	224	17	27,0
Maret 07	245	16	27,0
April 07	405	20	27,0
Mei 07	217,5	16	27,0
Juni 07	165,5	14	26,7
Juli 07	445,5	13	26,9
Agustus 07	214,5	6	27,4
September 07	119,5	4	27
Oktober 07	397,5	8	27
Jumlah	2.951	135	
Rata-rata	245,92	11,5	

Sumber: BMG

4.1.2. Kualitas Udara Ambien

Udara merupakan salah satu unsur alam yang pokok bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi terutama manusia. Tanpa udara yang bersih maka manusia akan terganggu terutama keselamatannya yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Kualitas udara ambien dari suatu daerah ditentukan oleh daya dukung alam daerah tersebut serta jumlah sumber pencemaran atau beban pencemaran dari sumber yang ada di daerah tersebut. Kualitas udara khususnya di perkotaan merupakan komponen lingkungan yang sangat penting, karena akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat maupun kenyamanan kota.

Pencemaran udara, khususnya di kota-kota besar, sudah merupakan masalah yang perlu segera ditanggulangi. Hal ini akibat dari peningkatan aktivitas manusia, pertambahan jumlah penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertambahan industri dan sarana transportasi.

Kegiatan skala kecil yang dilakukan perorangan juga menyebabkan pencemaran udara, seperti pembakaran sampah, rokok, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Di samping itu, asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan juga ikut memberikan andil dalam penurunan kualitas udara di tingkat lokal, nasional, dan regional ASEAN.

Baku mutu udara ambien adalah batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Adanya pencemaran atau tidak diketahui lewat pengukuran kualitas udara yang meliputi unsur fisik (suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, kecepatan dan arah angin serta kebisingan) dan unsur kimia (Sulfurdioksida (SO₂), Nitrogen dioksida (NO₂), Amonia (NH₃), Hidrogen Sulfida (H₂S), Oxidant (Ox), Karbon monoksida (CO) Hidrokarbon (HC), Total Partikel Debu (TSP), dan Timah hitam (Pb).

Tabel 4.2 Kualitas Udara Ambien di Wilayah Kabupaten Sukamara

Parameter	Satuan	Lokasi		
		Titik 1	Titik 2	Titik 3
PM 10	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	29,5	28,3	32,75
SO ₂	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10,16	11,05	10,75
CO	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,15	0,20	0,10
NO ₂	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	6,15	7,40	6,10
O ₃	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	50,34	51,25	62,05

Sumber : Laboratorium tahun 2007

Ket : Titik 1 = Kelurahan Padang

Titik 2 = Kelurahan Mendawai

Titik 3 = Desa Sedawak

Untuk Mengetahui kualitas udara ambien secara keseluruhan, maka hasil pengujian di atas dikonversi ke dalam Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dengan menggunakan persamaan yang tercantum di dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-107/KABAPEDAL/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara. Untuk Penentuan Batas ISPU disajikan pada tabel 4.3. Kemudian dari seluruh parameter yang dikonversi, dipilih ISPU tertinggi sebagai dasar penentuan kualitas udara di wilayah Kecamatan Sukamara. Hasil perhitungan konversi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Batas Indeks Standar Pencemaran Udara dalam Satuan SI

Indeks Standar Pencemar Udara	24 jam PM10 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	24 jam SO ₂ $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	8 jam CO $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	1 jam O ₃ $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	1 jam NO ₂ $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
50	50	80	5	120	(2)
100	150	365	10	235	(2)
200	350	800	17	400	1.130
300	420	1.600	34	800	2.260
400	500	2.100	46	1.000	3.000
500	600	2.620	57,5	1.200	3.750

Sumber : Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara. Kep-107/KABAPEDAL/11/1997

Tabel 4.4. Indeks Standar Pencemar Udara Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara

No.	Parameter	la	lb	Xa	Xb	Xx	la-lb	Xa-Xb	XX-Xb	ISPU
1	PM10	0	50	0	50	29,25	-50	-50	-20,75	29
2	SO ₂	0	50	0	80	10,5	-50	-80	-69,5	7
3	CO	0	50	0	5	0,15	-50	-5	-4,85	2
4	NO ₂	0	50	0	0	6,15	-50	0	6,15	-
5	O ₃	0	50	0	120	50,30	-50	-120	-69,66	21

Sumber : Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2007

Tabel 4.5. Indeks Standar Pencemar Udara Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara

No.	Parameter	la	lb	Xa	Xb	Xx	la-lb	Xa-Xb	XX-Xb	ISPU
1	PM10	0	50	0	50	28,3	-50	-50	-21,7	28
2	SO ₂	0	50	0	80	11,05	-50	-80	-68,95	7
3	CO	0	50	0	5	0,2	-50	-5	-4,8	2
4	NO ₂	0	50	0	0	7,4	-50	0	7,4	-
5	O ₃	0	50	0	120	51,25	-50	-120	-68,75	21

Sumber : Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2007

Tabel 4.6. Indeks Standar Pencemar Udara Desa Sedawak Kecamatan Sukamara

No.	Parameter	la	lb	Xa	Xb	Xx	la-lb	Xa-Xb	XX-Xb	ISPU
1	PM10	0	50	0	50	32,75	-50	-50	-17,25	29
2	SO ₂	0	50	0	80	10,75	-50	-80	-69,25	7
3	CO	0	50	0	5	0,1	-50	-5	-4,9	2
4	NO ₂	0	50	0	0	6,1	-50	0	6,1	-
5	O ₃	0	50	0	120	52,05	-50	-120	-67,95	21

Sumber : Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2007

Berdasarkan tabel 4.4, tabel 4.5 dan Tabel 4.6 di atas, dapat dikemukakan bahwa Indeks Standar Pencemar Udara di wilayah Kecamatan Sukamara dikategorikan sangat baik. Guna menggambarkan Kualitas Udara Ambien di wilayah Kecamatan Sukamara, maka dari ketiga titik pantau ISPU di atas dipilih ISPU tertinggi yaitu 33. Dengan demikian Kualitas Udara Ambien di Kecamatan Sukamara termasuk dalam kategori Sangat Baik (Skala 5).

4.2 Penyebab Penurunan Kualitas Udara

Sumber penurunan kualitas udara dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu: sumber bergerak (transportasi) dan sumber tidak bergerak (industri, pertambangan, bahan bakar, kebakaran hutan dan lahan dari wilayah lain serta pembakaran limbah padat).

Kedua kelompok di atas sangat berperan dalam menyumbang bahan pencemar ke udara. Semakin tinggi lalu lintas kendaraan bermotor, tingkat produksi industri dan tingginya ketergantungan konsumsi bahan bakar maka semakin bertambah debu dan gas/emisi buangan yang secara langsung mempengaruhi kualitas udara.

4.2.1 Sumber Bergerak

Di Indonesia kegiatan transportasi memberikan kontribusi sekitar 70% terhadap pencemaran udara. Jumlah kendaraan bermotor di Kab. Sukamara tahun 2006 mencapai 2.534 unit yang didominasi oleh jenis kendaraan roda dua sebanyak 2.386 unit dan mobil penumpang sebanyak 53 unit. Kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Kab. Sukamara sampai akhir tahun 2006 berjumlah 70 unit yang terdiri kendaraan penumpang umum 40 unit dan truck/pickup 30 unit. Melihat dari keadaan tersebut Kabupaten Sukamara masih belum terlalu banyak kendaraan baik pribadi maupun dinas, hanya kendaraan bermotor roda dua yang mendominasi. Karena masih merupakan kabupaten pemekaran tahun 2002, penurunan kualitas udara ambien yang diakibatkan gas buangan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor masih belum terlalu mengkhawatirkan.

Tabel 4.7

Banyaknya Kendaraan Bermotor Tahun 2006

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Jenis Bahan Bakar			
			Bensin	Solar	CNG	LPG
1	Mobil Penumpang	bh	55	15		
2	Bus	bh		3		
3	Truk	bh		93		
4	Sepeda motor	bh	2.368			
5	Lain-Lain	bh	-			

Sumber : Bappeda Kab. Sukamara, 2006.

Tabel 4.8

Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan Tahun 2002-2006 (Km)

No.	Tahun	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IIIA	Kelas IIIB
1	2006	-	195	147,032	276,94	70,73
2	2005	-	195	199,62	246,88	-
3	2004	-	195	199,62	246,88	-
4	2003	-	195	185,00	225,00	-
5	2002	-	195	175,00	225,00	-

Sumber : Bappeda Kab. Sukamara, 2006.

4.2.2 Sumber Tidak Bergerak

4.2.2.1 Rumah Tangga

Aktivitas rumah tangga juga dapat mencemari udara. Praktek pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka di Indonesia berpotensi mencemari udara. Namun belum ada data pendukung yang menunjukkan seberapa besar kontribusi dari sumber tersebut terhadap penurunan kualitas udara di Indonesia. Penggunaan bahan bakar fosil dan kayu di rumah tangga ikut menyumbang pencemaran udara dari sumber tidak bergerak meskipun tidak sebesar kontribusi pencemaran udara yang di sebabkan oleh aktivitas pabrik/industri.

4.2.2.2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Pembakaran lahan merupakan cara tradisional penyiapan ladang di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Sukamara. Cara ini dianggap lebih mudah dan murah dibandingkan dengan mengolah dan memupuk lahan.

Pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Sukamara bersifat musiman, yaitu pada musim kemarau yang panjang, kualitas udara sangat jelek sekali seiring dengan kabut asap akibat pembakaran lahan/hutan. Sehingga mengakibatkan kualitas udara yang buruk. Hal ini terjadi hanya satu kali dalam satu tahun yaitu pada musim kemarau.

Upaya-upaya untuk menjaga kualitas udara dan menanggulangi dampak penurunan kualitas udara meliputi:

- Pemantauan dan pengawasan terhadap sumber pencemar, khususnya untuk kegiatan industri. Di tahun 2007 kegiatan pengawasan terhadap kualitas udara dari industri di titik beratkan pada industri Perkebunan Kelapa Sawit.
- Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memantau dan melaporkan kejadian pencemaran udara di sekitarnya.
- Mengurangi kemungkinan terjadinya cemaran debu pada kegiatan pembangunan dengan mengaspal jalan-jalan utama.
- Mengevaluasi tingkat penataan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara.
- Memberikan peringatan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan kasus pencemaran udara yang dilakukan oleh industri ataupun kegiatan usaha lainnya.
- Merencanakan Program/Kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH_ kota).
- Melakukan pengukuran/pemantauan kualitas udara ambien.
- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan masker dan menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah pada kejadian kabut asap.
- Membagikan masker secara cuma-cuma kepada masyarakat, khususnya pada para pengguna jalan ketika terjadi kabut asap. Pembagian ini dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, organisasi dan kelompok masyarakat.
- Menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.



Bab 5 Lahan dan Hutan

Sumber :
Bappeda Kabupaten Sukamara

BAB V LAHAN DAN HUTAN

5.1. Sumber Daya Lahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14), yang dimaksud denganerusakan lingkungan hidup adalah *"tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan."* Kalimat tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sementara penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, beberapa perubahan fungsi atau pemanfaatan ruang perlu dikaji dan penilaian atas perubahan fungsi tersebut harus dikoordinasikan. Perubahan fungsi tersebut termasuk diantaranya perubahan bentuk fisik (bentang alam) sebagai akibat kejadian bencana alam maupun perbuatan manusia.

Tanah merupakan salah satu komponen lahan. Tanah adalah lapisan teratas kerak bumi, sumber daya tanah terutama dipandang dari segi kemampuannya menunjang kehidupan tanaman secara permanen, dan mengatur tata air pada lapisan tersebut. Secara umum tanah adalah material perubahan dari batuan, mempunyai sifat-sifat fisik tertentu, memiliki sifat teknik, mempunyai kemampuan menunjang kehidupan biologi, terdiri dari mineral dan bahan organik.

Sedangkan lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang boleh dibilang bersifat mantap atau dapat dikirakan bersifat mendaur, sejauh hal-hal tersebut berpengaruh penting atas penggunaan lahan pada masa kini dan masa mendatang. Dengan kata lain lahan mencakup semua unsur pada permukaan daratan (terrestrial) yang mempengaruhi penggunaan lahan potensial dan pengelolaan lingkungan. Lahan tidak hanya mencakup tanah, tetapi

juga bentang alam, iklim, hidrologi, vegetasi dan fauna, disamping perubahan yang telah dilakukan seperti pembuatan teras (sengkedan), drainase dan sebagainya.

Kerusakan lahan adalah penurunan kapasitas potensi lahan bagi produksi dan bagi pengelolaan lingkungan. Kerusakan tanah adalah berkurangnya kualitas dan kuantitas tanah, meliputi sifat-sifat fisik, sifat teknik serta kandungan mineral maupun bahan organiknya. Dari sisi penyebabnya kerusakan tanah dan lahan dapat disebabkan oleh (1) peristiwa alam (gempa, longsor, perubahan kimia); (2) perbuatan manusia (penggundulan vegetasi di hulu yang menimbulkan erosi dan sedimentasi, pembangunan perkotaan dan sebagainya); atau (3) gabungan peristiwa alam dengan perbuatan manusia (kebakaran lahan karena kekeringan, yang kemudian dipicu oleh perbuatan manusia seperti pembakaran ladang dan sebagainya). Dari aspek kegiatan yang menyebabkan kerusakan tanah dan lahan, dapat diidentifikasi beberapa contoh : (1) pemanfaatan lahan yang tidak sesuai sehingga menimbulkan lahan kritis dan longsor; (2) pembabatan hutan yang mengakibatkan banjir dan sedimentasi; (3) pembangunan permukiman di lahan resapan sehingga mengakibatkan muka air tanah dan mutu tanah menurun; (4) pemanfaatan air tanah yang berlebihan sehingga muka air tanah menurun dan terjadi amblesan; (5) lahan paksa tambang yang tidak direklamasi sehingga menimbulkan lahan kritis, penurunan kesuburan dan penggurunan.

Berdasarkan hasil pemantauan, secara khusus di Kabupten Sukamara bahwa usaha atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C seperti pasir, batu, sirtu, tanah urug dan lain-lain berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Bahan-bahan tersebut adalah bahan yang selalu dan banyak dibutuhkan dalam berbagai kegiatan pembangunan, sehingga kegiatan penambangannya selain menunjang pelaksanaan pembangunan secara nyata juga memberikan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

Penambangan bahan galian golongan C diawali dengan pembersihan vegetasi, dilanjutkan dengan pengupasan bahan penutup/tanah dan baru setelah itu dilakukan penggalian atau eksploitasi, baik secara manual dengan peralatan sederhana maupun dengan peralatan mekanik modern seperti traktor, backhoe dan lain-lain. Pada saat penambangan ini gejala terjadi perubahan karakteristik lahan, baik secara fisik atau hayati lahan yang ditandai dengan terjadinya proses erosi,

meningkatnya pelongsoran tanah, terganggunya tata air, hilangnya lapisan tanah dan atau berubahnya sifat-sifat fisik, kimia dan biologi tanah, serta rusaknya terrain atau bentang alam setempat. Reklamasi yang tidak terencana atau bahkan tidak dilaksanakannya reklamasi lahan, menyebabkan proses perusakan lahan ini terus berlanjut hingga akhir masa penmbangan.

5.2 Penguasaan Lahan

Penguasaan tanah menjelaskan hubungan orang atau badan hukum atas tanah. Penguasaan lahan berkaitan juga dengan adat atau tata cara penguasaan tanah yang berlaku dalam masyarakat. Informasi penguasaan lahan sangat penting dilihat dari aspek ketersediaan tanah dari aspek hukum. Bagi pihak yang memerlukan tanah status penguasaan lahan sangat perlu sebagai dasar untuk memcanakan biaya pembebasan lahan dan untuk memperoleh kepastian hukum pemilikan lahan.

Dengan menggunakan data pada tabel 3.9 pola penguasaan tanah di Kabupaten Sukamara terdiri dari penguasaan tanah oleh masyarakat seluas 6.702 Ha, yang terdiri dari pemukiman, ladang, belukar dan kebun campuran. Sedangkan tanah perkebunan kelapa sawit berstatus hak guna usaha. Tanah negara yang diatasnya terdapat konsensi hutan 61.605 Ha.

Pola penguasaan lahan dimulai dengan membuka hutan secara perorangan untuk ddigunakan menjadi ladang, baik dengan izin atau tanpa izin dari kepala desa. Penguasaan terhadap bekas ladang dan belukar yang sudah lama ditinggal (bero) tetap diakui sebagai milik yang membuka pertama kali. Penguasaan tanah yang berlaku di masyarakat adalah penguasaan individu bukan komunal (bersama).

Penguasaan tanah dalam pengertian tanah ulayat tidak sepenuhnya dapat diterapkan, karena tidak unsur-unsur hak ulayat dipenuhi. Pengakuan kawasan sebagai milik kelompok adat ada, tapi batasnya tidak jelas dan kedudukan tetua adat dalam pengelolaan kawasan tidak jelas.

5.3. Rencana Tata Ruang

Rencana tata ruang berisi rencana alokasi penggunaan lahan untuk kawasan lindung dan budidaya. Alokasi ruang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang, membentuk hubungan yang erat antar pusat-pusat permukiman, dan terwujudnya pola pemanfaatan ruang yang serasi antara

kegiatan budidaya dan konservasi. Rencana tata ruang menjadi acuan dalam memberikan izin yang berkaitan dengan penggunaan lahan. Rencana pemanfaatan ruang Kabupaten Sukamara dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Renca na Tata Ruang Kabupa te n Sukamara

No.	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
I Kawasan Lindung		
1.	Suaka Margasatwa (SM)	19.834
II Kawasan Budidaya		
1.	Hutan Produksi Terbats (HPT)	23.260
2.	Hutan Produksi (HP)	54.970
3.	Kwsn Pengembangan Permukiman dan Penggunaan Lain (KPP)	143.740
4.	Perkebunan	68.249
5.	Lahan basah	12.561
6.	Lokasi Transmigrasi	7.022
7.	Tambak	466
Luas Total		339.037

Sumber : Hasil Penghitungan Luas dari Peta Rencana Tata Ruang Tahun 2005

Dari peruntukan lahan seperti pada tabel diatas, lahan yang budidaya diluar kehutanan adalah : KPPL, perkebunan, tambak, lokasi transmigrasi dan lahan basah. Penggunaan KPPL diutamakan untuk pemenuhan lahan bagi kegiatan masyarakat meliputi permukiman dan lahan usaha. Perkebunan untuk kegiatan investasi dalam skala besar utamanya perkebunan kelapa sawit. Calon lokasi tambak untuk pengembangan perikanan tambak baik skala perusahaan dan usaha masyarakat. Lokasi transmigrasi dan lahan basah untuk pengembangan permukiman dan pertanian sawah pasang surut.

5.4. Kebakaran Hutan

Kebakaran lahan dan hutan merupakan permasalahan yang rutin terjadi di Indonesia setiap musim kemarau. Sebagian besar (70%) kebakaran lahan terjadi di luar kawasan hutan, dan hanya sebagian kecil saja (30%) yang terjadi di dalam kawasan hutan. Di masyarakat masih timbul persepsi bahwa timbulnya asap di berbagai wilayah di Indonesia seluruhnya disebabkan oleh kebakaran hutan. Padahal penyebab utamanya adalah pembakaran lahan untuk menyiapkan

perkebunan skala besar, perladangan, dan hanya sebagian kecil saja terjadi di Hutan Tanaman Industri. Bencana yang diakibatkan oleh praktik pembakaran lahan dan hutan adalah timbulnya polusi asap yang mengganggu berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, baik nasional maupun global, serta menyebabkan kerusakan lingkungan

Permasalahan utama dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan adalah pembukaan lahan dengan cara membakar biasa dilakukan oleh masyarakat karena biayanya murah, dan cepat. Saat ini belum dikembangkan alternatif teknologi lain yang lebih efisien dan efektif. Selain itu kepedulian para pihak dalam penanggulangan masih kurang, bahkan para pelaku pembakaran seringkali mengancam dan menentang. Oleh karena itu perlu dilakukan penertiban dan penegakan hukum yang optimal sehingga memberikan efek jera, serta peningkatan sarana dan prasarana yang saat ini masih terbatas.

Lahan dan Hutan di Kabupaten Sukamara pada umumnya merupakan hutan dan lahan yang mudah terbakar, maka ketika terjadi kebakaran akan mengeluarkan kabut dan asap tebal sehingga menimbulkan dampak (1) terjadinya perubahan iklim mikro; (2) Pencemaran udara; (3) terganggunya sarana transportasi, sungai, darat, laut dan udara; (4) terganggunya kesehatan masyarakat. Dalam pencemaran udara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke udara dan atau berubahnya tatanan udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Dampak dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut telah menimbulkan banyak kerugian baik dari segi fisik, hayati, ekonomi, sosial maupun kesehatan masyarakat. Dampak negatif pada lingkungan fisik antara lain meliputi berubahnya sifat fisik-kimia dan biologi tanah, tata air, penurunan kualitas udara, hilangnya/berkurangnya tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan dan lain sebagainya. Dampak pada lingkungan hayati antara lain meliputi menurunnya tingkat keanekaragaman hayati, terganggunya suksesi alami, terganggunya produksi bahan organik dan proses dekomposisi. Dari segi ekonomi yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan yaitu terjadinya penurunan produksi berbagai bidang

seperti kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan perkantoran, terganggunya kelancaran transportasi darat, air dan udara sehingga menimbulkan biaya ekonomi tinggi serta biaya pengobatan masyarakat. Dari segi sosial dan kesehatan dampak kebakaran hutan dan lahan yaitu terjadinya kabut asap yang dapat menimbulkan gangguan jarak pandang dalam melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan dan gangguan kesehatan seperti terjadi infeksi saluran pernapasan, batuk, asma, brankial, bronkitis, pneumonia, iritasi mata/kulit dan lain-lain. Hal ini terjadi akibat tingginya kepekatan asap dan kadar debu yang telah melampaui ambang batas.

Dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sukamara dihadapi beberapa masalah yaitu : (1) Kesadaran dan kepedulian masyarakat masih rendah; (2) Penegakan hukum masih lemah; (3) Keterbatasan dana dan peralatan; (4) Masih lemahnya koordinasi dan partisipasi lintas sektor yang terkait.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah yang strategis baik dalam hal membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat maupun melalui keikutsertaan masyarakat dalam rangka desentralisasi kewenangan. Pembentukan regu pemadam kebakaran di Kabupaten Sukamara yg terampil dan handal untuk melaksanakan tugas-tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Pemerintah daerah dalam mengatasi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan

Program pembangunan kehutanan di Kabupaten Sukamara adalah melakukan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi, penghijauan, perhutanan sosial dan konservasi serta pengamanan dan penyuluhan hutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dalam rangka memanfaatkan hutan dan penggunaan kawasan hutan (pasal 21) guna menghasilkan nilai tambah secara ekonomis bagi pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat dalam era otonomi daerah.

A scenic view of a river or lake with a dense forest in the background and a small boat in the foreground. The water is calm, reflecting the sky and the surrounding greenery. In the foreground, a small wooden boat with a green hull is partially visible on the left. The background is filled with tall, thin trees, likely a mangrove forest. The sky is blue with scattered white clouds.

Bab 6

Keanekaragaman Hayati

Sumber :
Bappeda Kabupaten Sukamara

BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Indonesia telah dikenal dunia sebagai negara yang memiliki tingkat keanekaragaman jenis flora dan fauna yang tinggi. Sekitar 27.500 jenis tumbuhan berbunga (10% dari seluruh jenis tumbuhan berbunga di dunia) 515 jenis satwa mamalia (12% dari seluruh jenis mamalia di dunia), 511 jenis satwa reptilia dan 270 jenis satwa amfibia (16% dari seluruh jenis di dunia) terdapat di Indonesia.

Jenis-jenis flora dan fauna tersebut, tersebar secara tidak merata diseluruh wilayah geografis Indonesia. Pada masing-masing wilayah geografis, terdapat jenis-jenis flora dan fauna yg khas/endemik dan tidak ditemui di wilayah lainnya. Kondisi penyebaran flora dan fauna yang demikian pada akhirnya memberikan identitas/ciri khusus pada masing-masing wilayah geografis tersebut. Dewasa ini keberadaan jenis-jenis flora dan fauna khas tersebut mengalami degradasi yang cukup memprihatinkan. Beberapa jenis flora dan fauna khas tersebut bahkan telah mengalami kepunahan. Beberapa jenis lainnya kini dinyatakan sebagai jenis yang terancam punah dan dilindungi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam rangka pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, antara lain dengan penetapan kebijakan-kebijakan dalam upaya dimaksud dan dituangkan dalam beberapa peraturan perundangan seperti : (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian flora dan fauna khas/endemik suatu wilayah geografis, Pemerintah menetapkan jenis flora dan fauna tersebut sebagai maskot bagi suatu daerah tertentu di

Indonesia yang menggambarkan identitas/ciri khas daerah tersebut melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 520/113/SJ, tanggal 25 Januari 2001 tentang Identitas Flora dan Fauna Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Dengan demikian, selain memberikan identitas tersendiri bagi suatu daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, Surat Keputusan tersebut juga diharapkan mampu menggugah masyarakat untuk dapat mengupayakan pelestarian flora dan fauna yang menjadi identitas/ciri khas daerahnya.

6.1 Kondisi Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sukamara

Hutan dan perairan di wilayah Kabupaten Sukamara merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, baik yang berstatus dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Vegetasi hutan yang tersisa di wilayah Kabupaten Sukamara umumnya merupakan hutan sekunder yang pernah mengalami penebangan. Kerusakan hutan menjadi semakin parah akibat konversi hutan yang ada menjadi lahan pertanian dan perkebunan, pemukiman, pertambangan dan kegiatan pembangunan lainnya. Selain hutan, rawa air tawar dan sungai-sungai merupakan habitat hidup berbagai jenis flora dan fauna. Jenis-jenis vegetasi yang ditemukan pada lokasi rawa umumnya tumbuh juga di lahan kering. Hutan rawa umumnya kaya akan epifit dan berbagai jenis palem-paleman.

Pohon-pohon yang umum ditemukan berasal dari genera *Alstonia*, *Shorea*, *Diospyros* dan *Eugenia*. Jenis satwa liar yang umum ditemui di hutan sekunder yang ada antara lain babi hutan, kera, kancil, tikus, biawak, ular dan berbagai jenis burung. Hewan peliharaan umumnya berada di perkampungan dan di kebun-kebun penduduk. Hewan yang dipelihara umumnya yang bernilai ekonomi seperti ayam, itik, kambing, babi, kerbau dan sapi.

6.2 Penyebab Kemerossotan Keanekaragaman Hayati

Pesatnya kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam mengakibatkan semakin berkurangnya/menipisnya habitat hidup flora dan fauna liar. Kegiatan manusia dalam bentuk konversi lahan yang semakin meningkat yang dilakukan baik untuk kepentingan penyediaan pemukiman dan tempat usaha, pembukaan lahan untuk kepentingan pembangunan jalan atau jembatan serta sarana kota lainnya seperti bahan galian golongan C, merupakan faktor penekan utama yang menyebabkan kemerossotan keanekaragaman hayati.

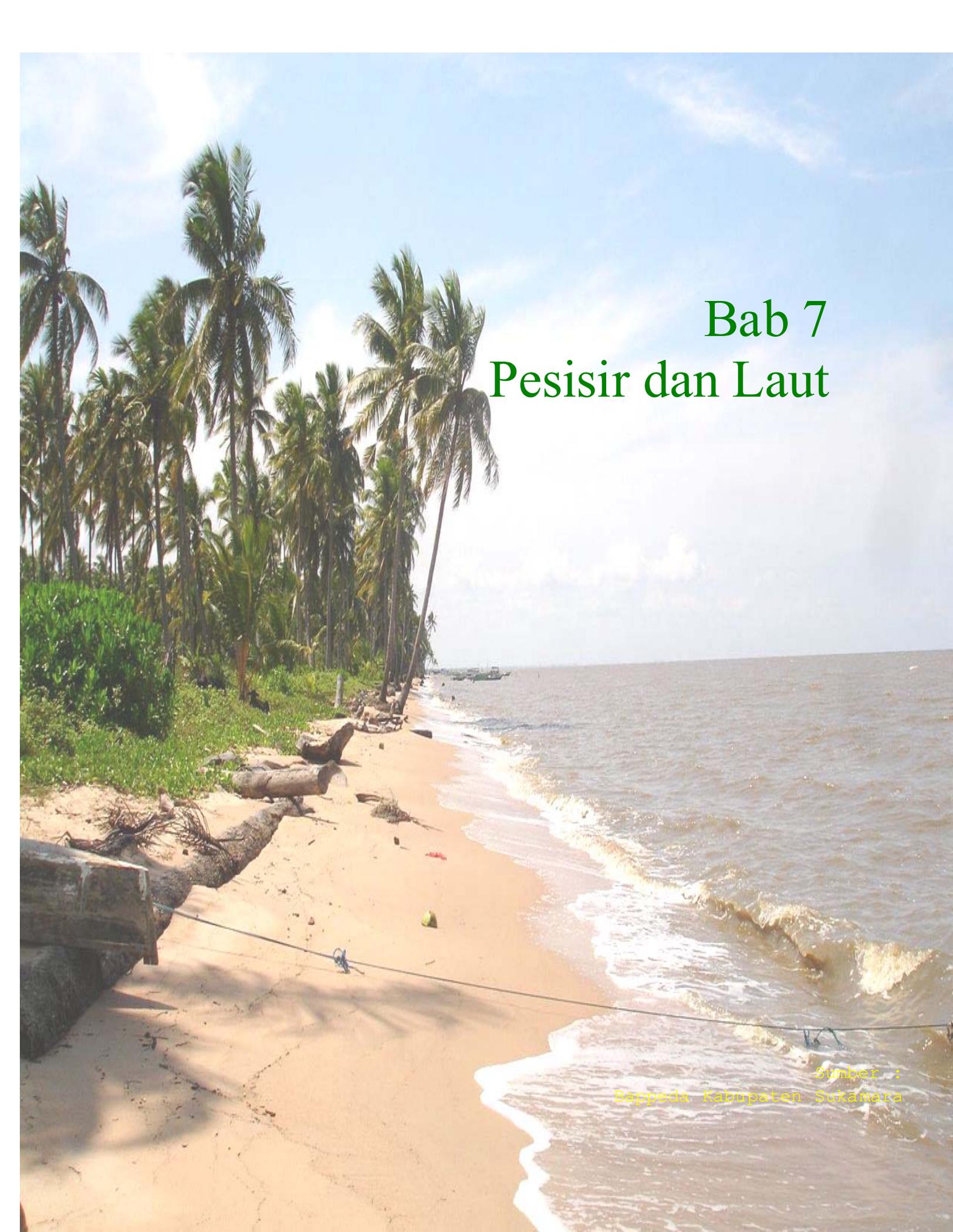
Hutan sekunder yang tersisa semakin berkurang, karena dikonversi menjadi lahan pertanian dan perkebunan serta areal pertambangan (galian golongan C). Degradasi lahan umumnya disebabkan karena teknik pengolahan lahan yang tidak tepat, tidak dilakukannya reklamasi dan revegetasi lahan segera setelah kegiatan pertambangan.

Kelestarian sumberdaya hayati juga dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat. Kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi daging rusa ikut mempengaruhi kelestarian jenis fauna tersebut. Kegiatan perburuan rusa baik dari wilayah sekitar Kabupaten Sukamara atau di luar Kabupaten Sukamara terus dilakukan untuk memenuhi permintaan masyarakat ini. Jika kita berjalan-jalan di sekitar pasar ikan Sukamara, kita dapat melihat banyaknya penjual daging sapi. Hal tersebut semakin memacu merossotnya jumlah jenis hewan tersebut.

Selain faktor manusia, keberadaan keanekaragaman hayati juga dipengaruhi oleh faktor alam, seperti dampak berkurangnya volume air sungai akibat musim kemarau yang panjang, yang pada akhirnya turut mempengaruhi kehidupan biota air di dalamnya.

6.3 Upaya Pengelolaan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati

1. Dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati Pemerintah Kabupaten menetapkan beberapa kawasan sebagai kawasan lindung. Selain berfungsi sebagai kawasan pelindung dan penyangga, kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi habitat hidup flora dan fauna liar yang ada (in-situ).
2. Pengetatan perijinan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan bentang lahan yang secara langsung dapat mengurangi keberadaan fauna dan flora liar yang ada juga dilakukan.
3. Pengembangan dan pemeliharaan kawasan yang memiliki potensi wisata dalam juga dilakukan, sebagai contoh Wisata Danau Burung, Pantai Jelai dan Bukit Patung.
4. Program rehabilitasi lahan, baik melalui dana Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dana Alokasi Khusus-Dana Reboisasi ataupun kegiatan lainnya telah dilakukan dalam upaya memperbaiki kualitas lahan khususnya lahan kritis yang ada di wilayah Kabupaten Sukamara.



Bab 7 Pesisir dan Laut

Sumber :
Bappeda Kabupaten Sukamara

BAB VII PESISIR DAN LAUT

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Namun, karakteristik laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan secara terpadu. Kebijakan pemerintah yang sektoral dan bias daratan, akhirnya menjadikan laut sebagai kolam sampah raksasa. Dari sisi sosial-ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai jumlah terbesar merupakan kelompok profesi paling miskin di Indonesia.

Kekayaan sumberdaya laut tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Kekayaan sumberdaya pesisir yang dikelilingi ekosistem pesisir tropis seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, berikut sumberdaya hayati dan non-hayati yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, kekayaan sumberdaya pesisir tersebut mulai mengalami kerusakan. Sejak awal tahun 2000 an, fenomena degradasi biogeofisik sumberdaya pesisir semakin berkembang dan meluas. Laju kerusakan sumberdaya pesisir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Rusaknya ekosistem mangrove, berimplikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan untuk sumberdaya ikan serta erosi pantai. Sehingga terjadi kerusakan tempat pemijahan dan daerah asuhan ikan, berkurangnya populasi benur, nener, dan produktivitas tangkap udang.

Semua kerusakan biofisik lingkungan tersebut adalah gejala yang terlihat dengan kasat mata dari hasil interaksi antara manusia dengan sumberdaya pesisir yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan daya dukung lingkungannya. Sehingga persoalan yang mendasar adalah mekanisme pengelolaan wilayah pesisir tidak efektif untuk memberi kesempatan kepada sumberdaya hayati pesisir yang dimanfaatkan pulih kembali atau pemanfaatan sumberdaya non-hayati disubstitusi dengan sumberdaya alam lain dan mengeliminir faktor-faktor yang menyebabkannya.

Keragaman hayati, sumberdaya perikanan, dan nilai esteti ka yang tinggi merupakan nilai lebih ekosistem pada daerah pesisir. Di sinilah ekosistem dengan produktivitas hayati tinggi, seperti terumbu karang, padang lamun (sea grass), rumput laut (sea weeds) dan hutan bakau (mangrove) ditemukan. Selain itu, pesisir pantai ini juga memberikan jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya dan sekaligus sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan.

Kabupaten Sukamara mempunyai panjang ± 75 Km yang berhadapan langsung dengan laut Jawa. Secara umum kondisi kawasan pesisir dan laut Kabupaten Sukamara belum terindikasi pencemaran karena belum adanya aktivitas yang mengacu kepada pencemaran lingkungan, misalnya industri, tempat wisata, dll.

Beberapa potensi kerusakan yang terjadi di pesisir Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara diantaranya kerusakan ekosistem bakau (mangrove) akibat abrasi air laut. Efek berantai yang ditimbulkan dari abrasi pantai menyebabkan pantai di sepanjang ± 75 km tersebut abrasi pantainya makin memprihatinkan. Bahkan, abrasi di sejumlah lokasi menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat di sekitar pesisir. Pasalnya, abrasi menyebabkan garis pantai makin dekat dengan pemukiman masyarakat sehingga ketika ombak datang kemungkinan pemukiman maupun pepohonan diterjang ombak sangat besar.



Sumber : Bappeda Kab. Sukamara, 2007

Tingkat abrasi pantai yang mengakibatkan terkikisnya alur-alur pantai tersebut sudah tergolong tinggi selama ini. Abrasi pantai dinilai sudah sampai pada kondisi yang membahayakan keselamatan warga setempat, tingkat abrasi pantai yang cukup parah terjadi di Kuala Jelai tersebut, menghancurkan kantor kecamatan, gedung sekolah dasar dan fasilitas umum lainnya yang berada di sekitar pantai namun bila hal itu terus dibiarkan berlangsung, dikhawatirkan dapat menghambat pengembangan potensi kelautan di Kabupaten Sukamara secara keseluruhan, baik pengembangan hasil produksi perikanan maupun pemanfaatan sumber daya kelautan lainnya. Peran serta dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian pantai. Di samping itu upaya pemerintah membangun alat pengaman (krib) yang berfungsi sebagai pemecah gelombang laut agar laju abrasi pantai bisa diminimalisasi juga terbukti efektif untuk saat ini. Sejauh ini pengamanan pantai melalui pemasangan beton berbagai ukuran sudah berjalan sepanjang ± 450 meter. Namun, upaya menangani abrasi tersebut terus akan dilakukan sesuai kemampuan daya dan dana. Masyarakat pun hendaknya mengimbangi upaya itu dengan secara aktif ikut ambil bagian menjaga dan mengamankan pantai dari terjangan abrasi, antara lain dengan tidak mengambil pasir dan batu sepanjang pesisir pantai. Karena bila masyarakat melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut proses abrasi pantai akan lebih cepat terjadi. Usaha penanggulangan kerusakan abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang laut adalah sebagai berikut :

1. Mulai Tahun Anggaran 2004 sampai tahun 2007 telah dianggarkan melalui dana APBN maupun APBD Kabupaten untuk mengatasi abrasi pantai tersebut, dengan membuat tanggul sepanjang pantai yang terkena abrasi.
2. Melakukan pemetaan permasalahan lingkungan yang terjadi pada daerah pesisir melalui pendekatan pengelompokan wilayah (cluster).
3. Melakukan inisiasi dan pengenalan program warga madani di wilayah pesisir kepada berbagai lapisan masyarakat.
4. Melakukan pelatihan untuk membentuk kader perintis atau pionir yang peduli lingkungan hidup bekerja sama perguruan tinggi.
5. Melakukan aksi nyata penanaman mangrove dan pohon multifungsi lainnya di lahan pesisir oleh para kader lingkungan.
6. Pembentukan jejaring forum komunikasi.

7. Membangun hubungan komunitas di tiap kelompok wilayah (duster) satu dengan lainnya antar wilayah lintas provinsi.
8. Melakukan ekspansi dan perluasan jejaring ke wilayah pengembangan yang strategis.

Gambar 7.1. Kondisi Pantai yang terkena abrasi



Sumber : Bappe da Kab. Su kam ara, 2007

Bab 8

Agenda Pengelolaan Lingkungan Hidup



Sumber :
Bappeda Kabupaten Sukamara

BAB VIII

Agenda pengelolaan lingkungan hidup

Rencana tindak lanjut yang harus diupayakan dalam satu tahun kedepan pada tahun 2008 untuk melanjutkan penanggulangan masalah lingkungan baik yang belum selesai maupun yang masih terkendala, adalah sebagai berikut :

1. Mengedepankan pola pemanfaatan Sumber Daya Alam tidak terbaharui yang secara bijaksana terkendali dengan mengutamakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
2. Menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukamara sebagai landasan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pemilihan lokasi pembangunan guna menghindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai daya dukungnya.
3. Mengendalikan dampak negatif lingkungan melalui penerapan AMDAL dan UKL UPL;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL, sehingga dokumen AMDAL dan UKL-UPL tidak hanya sekedar formalitas saja.
5. Mengendalikan dan menanggulangi pencemaran melalui penerapan 3 R (Reuse – memakai kembali, Recycle – mendaur ulang, Reduce - mengurangi) yang diprioritaskan pada pusat-pusat kegiatan penduduk.
8. Membangun perumahan yang sehat dan ramah lingkungan.
9. Menyelesaikan program jangka pendek penanggulangan Abrasi Pantai yang telah direncanakan dan disepakati.
10. Menerapkan Peraturan Daerah yang terkait dengan lingkungan secara adil dan konsisten.
11. Melakukan koordinasi penanganan masalah lingkungan lintas Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, khususnya masalah kebakaran hutan/lahan.
12. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

13. Melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang terbukti telah merusak lingkungan.
14. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan;
15. Mengembangkan peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
16. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia masing-masing sektor yang terkait dengan pengelolaan lingkungan;
17. Meningkatkan koordinasi antar sektor untuk memadukan aspek lingkungan dalam kegiatan penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengelolaan pembangunan.
18. Mendorong dan meningkatkan peranserta dunia usaha dalam upaya pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aca Sugandhy, Ir., MSc., *Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air*. Makalah Seminar Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Nasional, 30 September 1997 BAPPE NAS. Jakarta.
- Anonim, *Selamatkan Lingkungan Hidup Oleh Kita Untuk Kita*. Penerbit Penasih JICA untuk BAPPEDAL. 1999. Jakarta.
- Muslimin Nasution, Dr., Ir., *Pencegahan, Pemadaman dan Rehabilitasi Kerusakan Hutan Akibat Kebakaran*. Jakarta 13 September 1999.
- Oman Abdurahman, *Telaahan Staf Terhadap Masalah Penbangan Bahan Galian Golongan C*. Jakarta.
- Sunjoto, DIP. HE, Dr., Ir., *Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Penyediaan Air Bersih Sebagai Hak Kesejahteraan Masyarakat*. Majalah Penur No. 4 Thn. XXVIII 2001-1. Jakarta.
- Umar Fahmi Achmadi, MPH., Ph.D., Prof., Dr., *Peranan Air Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat*. Majalah Penabur No. 4 Thn XXVIII 2001-1. Jakarta.
- , *Recana Strategis Kabupaten Sukamara 2003 – 2008*. Pemerintah Kabupten Sukamara. 2003
- , *Kabupaten Sukamara Dalam Angka Tahun 2006*.